

**PERANAN PEMERINTAH
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM
UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA TERTINGGAL DI
PROVINSI LAMPUNG**

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam



Oleh

**Fariza Makmun
NPM. 1503030006**



**PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
PROGRAM DOKTOR PASCA SARJANA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

1441 H/2020 M

**PERANAN PEMERINTAH
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM
UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA TERTINGGAL DI
PROVINSI LAMPUNG**

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam



Prof. Dr. H.M. Nasor, M. Si

Promotor II

Prof. Dr. H. Marzuki Noor, M.S.

Promotor III

Dr. H. Shonhaji, M. Ag



**ROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
PROGRAM DOKTOR PASCA SARJANA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

1441 H/2020 M

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fariza Makmun

NPM : 1503030006

Program Studi : Program Doktor Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Instansi : Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul “Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Tertinggal di Provinsi Lampung” benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Juni 2020

Yang Menyatakan,

**Fariza Makmun
NPM. 1503030006**

Abstrak
PERANAN PEMERINTAH
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM
UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA TERTINGGAL
DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh:
Fariza Makmun

Pemberdayaan masyarakat Islam sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok masyarakat, terutama masyarakat tertinggal atau miskin. *Buttam up* dan atau *top down* sebagai pendekatan bukanlah satu yang baku dalam program pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan pendekatan dan orientasi pembangunan tergantung pada *political will* para pemangku kepentingan, terutama pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam kesejahteraan warga negaranya. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang berorientasi pada peningkatan SDM, SDA, dan Sumberdaya Finansial serta partisipasi masyarakat merupakan wujud dari kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan yang muncul adalah walaupun program pemerintah yang digulirkan untuk menekan angka kemiskinan cukup besar, seperti program dana desa, kartu sehat, kartu pintar, dan PKH cukup besar, tetapi tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Sukabanjar Kecamatan Kota Agung Timur Tanggamus masih dalam katagori tertinggal. 114 KK (25%) Dari 720 KK yang ada dalam katagori Pra Sejahtera dan 338 (46.94%) dalam katagori Keluarga Sejahtera.

Dengan demikian, perlu ada kajian tentang pengaruh implementasi peranan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat di desa tertinggal Provinsi Lampung, pengaruh peranan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat Islam di desa tertinggal Provinsi Lampung, pengaruh pemberdayaan masyarakat Islam terhadap kesejahteraan masyarakat di desa tertinggal Provinsi Lampung, dan pengaruh peranan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat Islam terhadap kesejahteraan masyarakat di desa tertinggal Provinsi Lampung.

Penelitian disertasi ini diharapkan berimplikasi: (1) *Secara teoritik*, berimplikasi dalam pengembangan teori-teori implementasi peranan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat Islam dalam mencapai kesejahteraan masyarakat; (2) *Secara empirik*, berimplikasi kepada masyarakat, elit masyarakat dari tingkat desa hingga pemerintah pusat yang terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat; (3) *Secara normatif*, berimplikasi bagi penguatan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan beragama dan budaya.

Penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mixed research*). Pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survey dan kuesioner sebagai alat pengumpul data terhadap 38 responden. Statistik deskriptif dan regresi berganda sebagai teknik analisis dengan bantuan program SPSS Versi 23 sebagai alat bantu. Interview, observasi, dan dokumentasi sebagai alat pengumpul data pendekatan kualitatif terhadap informan yang ditentukan dengan cara *snowball sampling*.

Penelitian Disertasi ini menemukan: (1) peranan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat dalam katagori tinggi, yakni rata-rata 79.53%. Pemberdayaan masyarakat Islam dalam katagori sedang, yakni rata-rata 59.31%. Sedangkan, tingkat kesejahteraan masyarakat dalam katagori tinggi, yakni rata-rata 73.79%. (2) implementasi kebijakan dalam bidang SDM, SDA, dan Sumberdaya Finansial ada signifikansi yang tidak nyata terhadap kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan spiritual, yakni yakni $r = 0,001^2 = 0.000$. Tetapi ada signifikansi yang nyata terhadap partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelatihan dan kerja terorganisir serta partisipasi dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, yakni $r = 0,260^2 = 0.068$. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelatihan dan kerja terorganisir serta partisipasi dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ada signifikansinya terhadap tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan spiritual masyarakat desa tertinggal di Provinsi Lampung, yakni yakni $r = 0,056^2 = 0.003$.

Kata Kunci: *Peranan Pemerintah, Pemberdayaan Masyarakat Islam, Kesejahteraan Masyarakat*

Abstract

**GOVERNMENT ROLE
IN EMPOWERMENT OF ISLAMIC COMMUNITIES
FOR THE WELFARE OF THE VILLAGE COMMUNITY IN LAMPUNG PROVINCE**

by
Fariza Makmun

Empowerment of Islamic society as a process is a series of activities to strengthen the power or empowerment of community groups, especially disadvantaged or poor communities. But up and or down as an approach is not a standard in community empowerment and welfare programs. The use of development approaches and orientations depends on the political will of stakeholders, especially the government as the responsible party, in the welfare of its citizens. Government policies which are oriented towards improving human resources, natural resources, and financial resources and community participation are a manifestation of the government's concern for the welfare of the community.

The problem that arises is that although the government program that was rolled out to reduce poverty is quite large, such as the village fund program, health cards, smart cards, and PKH is quite large, but the level of community welfare in Sukabanjar Village, Kota Agung Timur Subdistrict, Tanggamus is still in the category of lagging. 114 HH (25%) Of the 720 HH in the Pre-prosperous category and 338 (46.94%) in the Welfare Family category.

Thus, there needs to be a study of the effect of implementing the role of government on the welfare of communities in underdeveloped villages of Lampung Province, the influence of the role of government on empowering Islamic communities in underdeveloped villages of Lampung Province, the effect of empowering Islamic communities on community welfare in underdeveloped villages of Lampung Province, and the influence of the role of government and empowering the Islamic community for the welfare of the community in the underdeveloped villages of Lampung Province.

This dissertation research is expected to have implications: (1) Theoretically, it has implications in developing theories of the implementation of the role of government and the empowerment of Islamic communities in achieving community welfare; (2) Emperically, it has implications for the community, community elites from the village level to the central government involved in the community empowerment process; (3) Normatively, it has implications for strengthening spiritual values in religious and cultural life.

This dissertation research uses quantitative and qualitative approaches (mixed research). Quantitative approach to the type of survey research and questionnaire as a means of collecting data on 38 respondents. Descriptive statistics and multiple regression as an analytical technique with the help of SPSS Version 23 as a tool. Interviews, observations, and documentation as data collection tools are qualitative approaches to informants determined by snowball sampling.

This dissertation study found: (1) the role of government and the welfare of the community in the high category, which is an average of 79.53%. The empowerment of the Islamic community is in the medium category, at an average of 59.31%. Mean while, the level of community welfare in the category of high, which is an average of 73.79% (2) the implementation of policies in the fields of Human Resources, Natural Resources, and Financial Resources there is no real significance for economic welfare, education, health, and spirituality, namely $r = 0.001^2 = 0.000$. But the real significance to community participation in training and organized work and participation in decision making and implementation of community empowerment programs, which is $r = 0.260^2 = 0.068$. Community participation in participating in training and organized work and participation in decision making and implementation of community empowerment programs have significance for the level of income, education, health, and spiritual of disadvantaged rural communities in Lampung Province, namely $r = 0.056^2 = 0.003$.

Keywords: *Role of Government, Empowerment of Islamic Communities, Public Welfare*

الملخص

دور الحكومة في تمكين المجتمعات الإسلامية

لرعاية مجتمع القرية في مقاطعة لامبونج

فاريزا مأمون

إن تمكين المجتمع الإسلامي كعملية عبارة عن سلسلة من الأنشطة لتقوية قوة أو تمكين الجماعات المجتمعية ، وخاصة المجتمعات المحرومة أو الفقيرة. يعتمد استخدام مناهج وتوجهات التنمية على الإرادة السياسية لأصحاب المصلحة ، وخاصة الحكومة كطرف مسؤول ، في رفاهية مواطنيها. تمثل السياسات الحكومية الموجهة نحو تحسين الموارد البشرية والموارد الطبيعية والموارد المالية ومشاركة المجتمع دليلاً على اهتمام الحكومة برفاهية المجتمع.

لمشكلة التي تنشأ هي أنه على الرغم من أن البرنامج الحكومي الذي تم تطبيقه للحد من الفقر كبير جداً ، مثل برنامج صندوق القرية ، والبطاقات الصحية ، والبطاقات الذكية ، و PKH كبير جداً ، ولكن مستوى رفاهية المجتمع في قرية (سوكا بنجار كوتا أغونج السرقى) لا يزال في فئة التأخر. 114 سمو (٢٥ من مائة) من ٧٢٠ سمو في فئة ما قبل الازدهار و ٣٣٨ (٤٦.٤٤) من مائة) في فئة رعاية الأسرة.

وبالتالي ، هناك حاجة إلى دراسة تأثير تنفيذ دور الحكومة على رفاهية المجتمعات في القرى المتخلفة في مقاطعة لامبونج ، وتأثير دور الحكومة على تمكين المجتمعات الإسلامية في القرى المتخلفة في مقاطعة لامبونج ، وتأثير تمكين المجتمعات الإسلامية على رفاهية المجتمع في القرى المتخلفة في مقاطعة لامبونج ، وتأثير دور الحكومة وتمكين المجتمع الإسلامي من أجل رفاهية المجتمع في القرى المتخلفة في مقاطعة لامبونج.

من المتوقع أن يكون لبحث الأطروحة دلالات: (1) نظرياً ، له آثار في تطوير نظريات تنفيذ دور الحكومة وتمكين المجتمعات الإسلامية في تحقيق رفاهية المجتمع ؛ (٢) بشكل سلمي ، فإن لها آثار على المجتمع ، ونخب المجتمع من مستوى القرية إلى الحكومة المركزية المشاركة في عملية تمكين المجتمع ؛ (٣) عادة ما يكون لها آثار على تعزيز القيم الروحية في الحياة الدينية والثقافية.

يستخدم هذا البحث أطروحة كمية ونوعية (البحث المختلط). المقارنة الكمية لنوع البحث والاستبيان الاستقصائي كوسيلة لجمع البيانات عن 38 مجيئاً. الإحصائيات الوصفية والانحدار المتعدد كأسلوب تحليلي بمساعدة SPSS الإصدار ٢٣ كأداة. المقابلات والملاحظات والتوثيق كأدوات لجمع البيانات هي مقاربات نوعية للمخبرين التي تحدد عينات كرة الثلج.

وجدت هذه الدراسة أطروحة: (1) دور الحكومة ورفاهية المجتمع في فئة العليا بمتوسط ٧٩.٥٣. وفي الوقت نفسه ، فإن تمكين المجتمع الإسلامي يقع في الفئة المتوسطة ، بمتوسط ٥٩.٣١. في غضون ذلك ، بلغ مستوى رفاهية المجتمع في فئة عالية ، بمتوسط ٧٩.٧٣. (٢) ليس لتنفيذ السياسات في مجالات الموارد البشرية والموارد الطبيعية والموارد المالية أي أهمية على الرفاهية الاقتصادية والتعليم والصحة والروحانية أي $r = 0.001^2 = 0.000$. ولكن هناك أهمية لمشاركة المجتمع في التدريب والعمل المنظم والمشاركة في صنع القرار وتنفيذ برامج تمكين المجتمع والتي هي $r = 0.260^2 = 0.068$. مشاركة المجتمع في المشاركة في التدريب والعمل المنظم وكذلك المشاركة في صنع القرار وتنفيذ برامج تمكين المجتمع لها أهمية بالنسبة لمستوى الدخل والتعليم والصحة والروحانية للمجتمعات الريفية المحرومة في مقاطعة لامبونج أي ، $r = 0.056^2 = 0.003$.

الكلمات المفتاحية: دور الحكومة وتمكين المجتمعات الإسلامية والصالح العام

**LEMBAR PERSETUJUAN
TIM PENGUJI**

Disertasi Yang berjudul “Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Tertinggal di Provinsi Lampung” ditulis oleh Fariza Makmun, NPM. 1503030006, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam telah diujikan dan dipertahankan dalam Ujian Terbuka/Promosi Program Doktor Pascasarjana Universitas Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, pada tanggal 10 Juni 2020.

Bandar Lampung, 30 Juni 2020

Tim Penguji

Tanda Tangan

**Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag.
(Ketua Sidang)**

**Prof. Dr. Hj. Siti Patimah, M. Pd.
(Penguji I)**

**Prof. Dr. H.M. Nasor, M. Si.
(Penguji II)**

**Prof. Dr. H. Marzuki Noor, M.S.
(Penguji III)**

**Dr. H. Shonhaji, M. Ag.
(Penguji IV)**

**Prof. Dr. H. Idham Kholid, M. Ag.
(Penguji V)**

**Dr. Fitri Yanti, M.A.
(Sekretaris Sidang)**



Bandar Lampung, 30 Juni 2020

**Direktur Pascasarjana:
PPs UIN Raden Intan Lampung,**

**Prof. Dr. H. Idham Kholid, M. Ag.
NIP. 19600102019880311005**

RIWAYAT HUDUP

Fariza Makmun, S. Ag., M. Sos. I, lahir di Metro Lampung pada tanggal 09 Desember 1973, anak pertama dari 6 bersaudara. Ayah bernama Makmun Abdullah bin Abdullah dan ibu bernama Hj. Nurjanah binti Hamim.

Pendidikan formal SDN 3 Penengahan Tanjung Karang Pusat lulus tahun 1985, SMP Budi Mulia Bandar Lampung lulus tahun 1988, SPG Muhammadiyah Bandar Lampung lulus tahun 1991, Strata-1 (S1) Jurusan PPA Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung lulus tahun 1996, Strata-2 (S2) Program Studi PMI Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung lulus tahun 2008, dan pada tahun 2015 diterima sebagai mahasiswa Program 5000 Doktor Program Studi PMI Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Riwayat jabatan Penulis adalah Dosen Tetap Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, sejak tahun 1997 hingga sekarang. Riwayat Jabatan, Pembina Tingkat 1 (IV/b), pernah menjabat Ketua jurusan Antar Waktu pada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung tahun 2014, Anggota Senat Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan tahun 2003-2007.

Menerima Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X (sepuluh) tahun dari Presiden Republik Indonesia pada Tahun 2010 dan Menerima Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX (dua puluh) tahun dari Presiden Republik Indonesia pada Tahun 2017.

Status, menikah dengan Dr. Faizal, S. Ag., M. Ag dan dikarunia 3 orang putra yang bernama: **Adam Faridh, Muhammad Fadhil, dan Fuad Husen.**

PERSEMBAHAN

Dengan Mengucap Lafadz

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱

Disertasi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku, Papah Makmun Abdullah (Alm) dan Mamah Hj. Nurjanah.
Terimakasih atas do'a dan motivasinya, semoga Allah SWT memulyakan Papah dan Mamah.
2. Suami yang sangat kucintai dan kusayangi: Dr. Faizal, S. Ag., M. Ag yang dengan sabar memberikan semangat dan mendampingi dalam suka maupun duka serta anak-anakku: Adam Faridh, Muhammad Fadhil, dan Fuad Husen harapan masa depan ayah dan bunda.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung

MOTTO'



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan ma'unah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan disertasi ini. Sholawat serta salam, penulis sanjungkan kepada Rosulullah Muhammad SAW., sebagai uswah hasanah dalam menggapai pengetahuan dunia dan akherat.

Penulis menyadari, bahwa disertasi yang berjudul “Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Tertinggal di Provinsi Lampung” dapat diselesaikan dengan izin Allah SWT dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan syukur dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag., Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah menjaga eksistensi Program Pascasarjana Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Raden Intan Lampung sebagai lembaga pendidikan tinggi dan memberi kesempatan kepada penulis untuk menjadi peserta didik;
2. Prof. Dr. H. Idham Kholid, M. Ag., Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kebijakan pelayanan dalam penyelesaian studi;
3. Bambang Budiwiranto, S. Ag., M. Ag., Ph.D dan Dr. Fitri Yanti, M. A. selaku Ketua dan Sekretaris Program Doktor Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN

Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelayanan dan motivasi kepada penulis dalam kelancaran penyelesaian studi;

4. Prof. Dr. H. Nasor, M. Si. (Promoter I), Prof. Dr. H.M. Marzuki Noor, M.S. (Promotro II), dan Dr. Shonhaji, M. Ag (Promotor III) yang telah membimbing dan memberikan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini;
5. Ibu Ristiani, S. I. Kom., Kepala Desa beserta aparatur pemerintahan desa dan masyarakat Sukabanjara Kecamatan Kota Agung Timur Tanggamus yang telah memberikan data dan informasi guna penyelesaian disertasi ini;
6. Teman-teman seperjuangan angkatan III tahun 2015 Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Program Doktor Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Atas pelayanan, dukungan, motivasi, bimbingan, dan bantuannya, baik materi maupun immateri penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan berdo'a semoga amal kebaikan akan dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik. Semoga disertasi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan pengembangan keilmuan, *Aamiin*.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Juni 2020
Penulis,

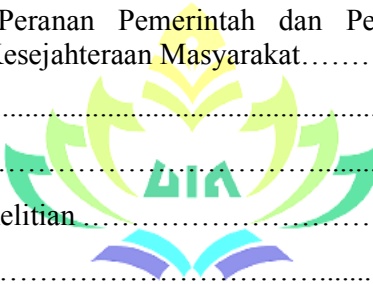
Fariza Makmun
NPM. 1503030006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PROMOTOR.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
PEDOMAN TRANSLASI.....	xx
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	11
1. Identifikasi Masalah.....	11
2. Batasan Masalah.....	11
3. Rumusan Masalah.....	12
C. Hasil Penelitian Terdahulu.....	12
D. Tujuan dan Kegunaan (Kontribusi) Penelitian.....	18
1. Tujuan Penelitian.....	18
2. Kegunaan Penelitian.....	19
E. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA TERTINGGAL.....	22
A. Pemberdayaan Masyarakat Islam.....	22
1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat Islam.....	23
2. Matra (Bidang) Pemberdayaan Masyarakat Islam.....	28
3. Subyek dan Obyek Pemberdayaan Masyarakat Islam.....	34

4. Metode Pemberdayaan Masyarakat Islam	37
5. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Islam	56
6. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Islam	61
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal	65
8. Faktor Pendukung dan penghambat Pemberdayaan Masyarakat.....	71
B. Kesejahteraan Masyarakat	74
C. Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam	85
D. Pengaruh Peranan Pemerintah Daerah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Kesejahteraan Masyarakat	98
E. Kerangka Fikir	101
F. Hepotesis Penelitian	108
BAB III. METODE PENELITIAN.....	109
A. Pendekatan, Tempat, dan Waktu Penelitian	109
1. Pendekatan Penelitian	109
2. Tempat Penelitian.....	111
3. Waktu Penelitian	111
B. Metode Survei	111
1. Desain Penelitian.....	113
2. Populasi dan Sampel	114
3. Teknik Pengumpulan Data	116
4. Instrumen Variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y).....	116
5. Instrumen Variabel Peranan Pemerintah (X1)	122
6. Instrumen Pemberdayaan masyarakat Islam (X2).....	127
7. Deskripsi Data	133
8. Teknik Analisa Data	133
9. Hepotesis Statistik	135
C. Metode Kualitatif	137
1. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	138
2. Analisa Data	143
BAB IV. PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA	145
A. Profil Desa Sukabanyar	145
B. Deskripsi Data Hasil Penelitian	157
1. Kesejahteraan Masyarakat	158
a. Kesejahteraan Ekonomi	158
b. Kesejahteraan Pendidikan	164
c. Kesejahteraan Kesehatan	170
d. Kesejahteraan Spiritual	176
2. Peranan Pemerintah Daerah.....	182

a. Implementasi Peranan Pemerintah dalam Bidang SDM.....	182
b. Implementasi Peranan Pemerintah dalam Bidang SDA.....	190
c. Implementasi Peranan Pemerintah dalam Bidang Finansial.....	197
3. Pemberdayaan Masyarakat Islam.....	205
a. Penyadaran.....	205
b. Pelaksanaan Pemberdayaan.....	211
C. Uji Hepotesisi	221
D. PEMBAHASAN	242
1. Pengaruh Peranan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	243
2. Pengaruh Peranan Pemerintah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Islam.....	256
3. Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat Islam Terhaap Kesejahteraan Masyarakat.....	267
4. Pengaruh Peranan Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	275
BAB V. PENUTUP.....	287
A. Kesimpulan	287
B. Implikasi Penelitian.....	289
C. Saran-Saran	290
DAFTAR PUSTAKA	291
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal
1.	Kisi-Kisi Instrumen Variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y)	116
2.	Tingkat Validitas Kuesioner Variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y)	120
3.	Tingkat Reliable Indikator Variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y)	122
4.	Kisi-Kisi Instrumen Variabel Peranan Pemerintah (X ₁)	123
5.	Tingkat Validitas Kuesioner Variabel Peranan Pemerintah Modal Sosial (X ₁)..	125
6.	Tingkat Reliabilitas Indikator Variabel Peranan Pemerintah (X ₁)	127
7.	Kisi-Kisi Instrumen Variabel Pemberdayaan Masyarakat Islam (X ₂)	129
8.	Tingkat Validitas Kuesioner Variabel Pemberdayaan masyarakat Islam (X ₂)...	131
9.	Tingkat Reliable Indikator Variabel Pemberdayaan Masyarakat Islam (X ₂)	132
10.1.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	148
10.2.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	148
10.3.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	149
10.4.	Sarana Dan Prasarana	150
10.5.	Lembaga Keagamaan	153
11.1.	Keadaan Sumber Daya Alam	154
11.2.	Dana Pembangunan Berdasarkan Sumber	157
12.1.	Frekuensi Distribusi Indikator Kesejahteraan Ekonomi (Y ₁)	159
12.2.	Tingkat Kesejahteraan Keluarga Masyarakat	163
12.3.	Frekuensi Distribusi Indikator Kesejahteraan Pendidikan (Y ₂)	165
12.4.	Frekuensi Distribusi Indikator Kesejahteraan Kesehatan (Y ₃)	171
12.5.	Frekuensi Distribusi Indikator Kesejahteraan Spiritual (Y ₄)	177
13.1.	Frekuensi Distribusi Indikator Kebijakan SDM (X _{1.1})	183
13.2.	Frekuensi Distribusi Indikator Kebijakan SDM (X _{1.2})	191
13.3.	Frekuensi Distribusi Indikator Kebijakan Sumberdaya Finansial (X _{1.3})	198
14.1.	Frekuensi Distribusi Indikator Penyadaran (X _{2.1})	206
14.2.	Frekuensi Distribusi Indikator Pelaksanaan Pemberdayaan (X _{2.2})	212
15.1.	Variabel Penjelas yang Masuk dalam Model Regresi	222

15.2.	Nilai Penduga Koefisien Persamaan Regresi untuk Variabel X_1 dan X_2 Terhadap Y	224
15.3.	Residuals Statistik	225
15.4.	ANOVA	226
16.1.	Variabel Penjelas yang Masuk dalam Model Regresi X_1, X_2	227
16.2.	Nilai Penduga Koefisien Persamaan Regresi untuk Variabel X_1 terhadap X_2	229
16.3.	Residuals Statistik	230
16.4.	ANOVA	231
17.1.	Variabel Penjelas yang Masuk dalam Model Regresi X_2, Y	232
17.2.	Model Summary	233
17.3.	Nilai Penduga Koefisien Persamaan Regresi untuk Variabel X_2 terhadap Y ...	233
17.4.	Residuals Statistik	234
17.5.	ANOVA	235
18.1.	Variabel Penjelas yang Masuk dalam Model Regresi X_1, X_2, Y	236
18.2.	Nilai Penduga Koefisien Persamaan Regresi untuk Variabel X_1, X_2, Y	238
18.3.	Residuals Statistik	239
18.4.	ANOVA	241

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal
1	Program dan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	86
2	Kedudukan Masyarakat, Pemerintah, Politis, dan Pelaku Bisnis.....	88
3	Kerangka Fikir	103
4.a.	Skema Model Hirarchi Sebernitika Talcott Parsons.....	106
b.	Skema AGIL dalam Sistem Tindakan.....	107
5	Desain Penelitian	114
6	Struktur Pemerintahan Desa Taman Cari	147
7	Histogram Data Indikator Kesejahteraan Ekonomi	160
8	Histogram Data Indikator Kesejahteraan Pendidikan	167
9	Histogram Data Indikator Kesejahteraan Kesehatan	173
10	Histogram Data Indikator Kesejahteraan Spiritual	178
11	Histogram Data Indikator Implementasi Kebijakan SDM	184
12	Histogram Data Indikator Implementasi Kebijakan SDA	192
13	Histogram Data Indikator Implementasi Kebijakan SD Finansial.....	199
14	Histogram Indikator Penyadaran	207
15	Histogram Indikator Pelaksanaan Pemberdayaan	213
16.1	Histogram Nilai Resedu Model Regresi	226
16.2	Plot Normalitas Sisaan Model Regresi	226
17.1	Histogram Nilai Resedu Model Regresi	230
17.2	Plot Normalitas Sisaan Model Regresi X_1, X_2	230
18.1	Histogram Nilai Resedu Model Regresi	234
18.2	Plot Sisaan Model Regresi X_2, Y	235
19.1	Histogram Nilai Resedu Model Regresi	244
19.2	Plot Sisaan Model Regresi X_1, X_2, Y	244
20	Plot Korelasi Antara Variabel X_1, X_2 , dan Y	241

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK. Promotor
2. Surat Mohon Izin Pra Survey
3. Surat Mohon Izin Penelitian
4. Daftar Sampel Metode Kuantitatif
5. Daftar Sampel Data Kualitatif
6. Daftar Kuesioner
7. Sebaran Data dalam Tabulasi
 - a.1. Variabel X1 Indikator Implementasi Kebijakan SDM (X1.1)
 - a.2. Variabel X1 Indikator Implementasi Kebijakan SDA (X1.2)
 - a.3. Variabel X1 Indikator Implementasi Kebijakan SDF (X1.3)
 - b.1. Variabel X2 Indikator Penyadaran (X2.1)
 - b.2. Variabel X2 Indikator Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Islam (X2.2)
 - c.1. Variabel Y Indikator Kesejahteraan Ekonomi (Y.1)
 - c.2. Variabel Y Indikator Kesejahteraan Pendidikan (Y.2)
 - c.3. Variabel Y Indikator Kesejahteraan Kesehatan (Y.3)
 - c.4. Variabel Y Indikator Kesejahteraan Spiritual (Y.4)
8. Sebaran Data Distribusi Frekuensi
9. Skor Pernyataan Berdasarkan Kisi-Kisi dan Prediktor Pertanyaan
 1. Variabel Peranan Pemerintah Indikator Implementasi Kebijakan SDM
 2. Variabel Peranan Pemerintah Indikator Implementasi Kebijakan SDA
 3. Variabel Peranan Pemerintah Indikator Implementasi Kebijakan Sumberdaya Finansial (SDF)
 4. Variabel Pemberdayaan Masyarakat Islam Indikator Penyadaran
 5. Variabel Pemberdayaan Masyarakat Islam Indikator Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Islam
 6. Variabel Kesejahteraan Masyarakat Indikator Kesejahteraan Ekonomi
 7. Variabel Kesejahteraan Masyarakat Indikator Kesejahteraan Pendidikan
 8. Variabel Kesejahteraan Masyarakat Indikator Kesejahteraan Kesehatan
 9. Variabel Kesejahteraan Masyarakat Indikator Kesejahteraan Spiritual

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	a	ظ	ḍ
ب	b	ط	ṭ
ت	t	ظ	ẓ
ث	ṯ	ع	‘
ج	j	غ	g
ح	ḥ	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	ẓ	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	ṣ	ع	‘
		ي	y

B. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliternya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harokat dan Huruf	Huruf dan tanda
اَ	â
اِ	î
اُ	û

¹ Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, *Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*, (Bandar Lampung: Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2017)

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi yang ditandai dengan aktivitas perdagangan global melintas batas wilayah negara dan geografis, mengutamakan kepentingan ekonomi dan mengabaikan kepentingan kemanusiaan, perdamaian, kebersamaan, dan kesejahteraan sosial. Globalisasi yang dianut oleh kaum kapitalis memporak porandakan tatanan sosial, lingkungan hidup, budaya, kearifan lokal, dan nilai-nilai luhur bangsa. Melahirkan pemerintah yang cenderung korup, kolusi, dan nepotisme. Akibatnya, pemerintah seringkali terpengaruh pada perilaku yang menguntungkan kaum kapitalis.²

Untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa dan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Batang Tubuhnya, maka globalisasi yang merupakan keniscayaan, bukan untuk dihindari tetapi untuk disiasati, agar kesejahteraan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Untuk mencapai kesejahteraan, masyarakat harus diberdayakan, yakni didorong untuk memiliki kemampuan sesuai dengan potensi dan kebutuhannya, memiliki daya saing, mandiri melalui aktivitas-aktivitas pemberdayaan.³ Atau menurut Adams, pemberdayaan merupakan cara bagi individu dan kelompok untuk menumbuhkan kemampuan dalam mengelola lingkungan dan mencapai tujuan, sehingga mereka mempunyai kemampuan

² Oos M. Anwar, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.1

³ *Ibid.*, h. 2

untuk bekerja dan saling membantu untuk memaksimalkan kualitas hidup mereka.⁴

Pemaknaan istilah pemberdayaan sebagaimana dirumuskan di atas, mulai tren pada tahun 90-an walaupun tidak sepepuler namanya, karena tidak sebanding dengan realisasinya. Realisasi konsep pemberdayaan terjadi diskursus pamaknaan, yakni pemaknaan secara parsial antara pembangunan dan pemberdayaan, sehingga menjadi problem dalam tahapan implementasi program. Permasalahan implementasi tersebut terjadi karena:

Pertama, pembangunan merupakan istilah baku yang digunakan oleh pemerintah dalam mencapai tarap hidup/kualitas hidup yang lebih baik. Sehingga, istilah pemberdayaan difahami sebagai suatu proses pembangunan yang dimodifikasi dari paradigma yang digunakan sebelumnya, tetapi bukan antitesa dari kegagalan paradigma sebelumnya. *Kedua*, paradigma pemberdayaan merupakan suatu model atau starategi dalam tahapan implementasi konsep pembangunan. Oleh karena itu, istilah pemberdayaan, pengembangan masyarakat, dan kesejahteraan sosial serta istilah-istilah lain yang sejajar dengannya dilegitimasi pemerintah dalam kontek pembangunan nasional. *Ketiga*, memahami istilah pemberdayaan dan pembangunan secara parsial akan menimbulkan kendala terutama dalam merubah *mineset* dan prilaku masyarakat pada tingkat *grassroad*, karena selama puluhan tahun mereka hanya mengenal istilah pembangunan, apapun hasil dan pengaruhnya terhadap kualitas hidup yang mereka dapatkan dan rasakan.

⁴ Robert Adams, *Social Work and Empowerment*, (New York: Palgrave MacMillan, 2003), h. 8

Ketiga alasan di atas, tampak jelas ketika pemerintah bahkan BUMN menggunakan istilah-istilah pemberdayaan dalam implementasi pembangunan nasional. Misalnya, pemerintah membentuk lembaga atau dinas pemberdayaan masyarakat desa, biro pemberdayaan perempuan dalam struktur parlemen dan pemerintahan daerah. Program prioritas adalah Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri baik Perkotaan maupun Perdesaan (PNPM-MP). BUMN-BUMN juga berupaya membentuk divisi khusus yang mengelola program pemberdayaan masyarakat, yakni program yang merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya dengan memanfaatkan dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Istilah pembangunan, pemberdayaan, dan kesejahteraan yang digunakan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga swasta pada hakekatnya merupakan strategi dalam mencapai kesejahteraan bangsa. Karena sesungguhnya, pemerintah berkewajiban memenuhi hak warga negara⁵ atas kewajiban warga negara⁶ yang telah mereka penuhi. Walaupun demikian, implementasi konsep pemberdayaan dan kesejahteraan tersebut belum optimal, sehingga kemiskinan, kebodohan, ketergantungan masyarakat masih menjadi realitas sekaligus menjadi wujud ketidakberdayaan masyarakat. Karena, pemberdayaan bukan sekedar memberikan keterampilan, pendampingan, sumbangan atau bantuan, pemberdayaan lebih pada upaya menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri

⁵ Kewajiban warga negara adalah membayar pajak, melakukan bela negara, dan mentaati hukum. Budi Setiyono, *Model dan Desain Negara Kesejahteraan*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), h. 24-25

⁶ Hak warga negara adalah: (1) mendapatkan jaminan (perlindungan) sosial, seperti mendapatkan kelayakan hidup sejahtera sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan; (2) mendapatkan perlindungan hukum; (3) hak berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. *Ibid.*, h. 26-27

sesuai dengan potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat setempat. Pemberdayaan sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin. Pemberdayaan sebagai tujuan adalah pemberdayaan menunjuk pada suatu hasil yang hendak dicapai dalam perubahan sosial, yaitu masyarakat yang mandiri.⁷

Mandiri dan berdaya dalam perspektif pengembangan masyarakat Islam adalah mandiri dan berdaya dalam aspek sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya nilai yang bersumber dari masyarakat itu sendiri.⁸ Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yakni terjaminnya standar kebutuhan ekonomi masyarakat.⁹ Sehingga, masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan spiritual.

Dengan demikian, masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan dengan cara peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri.¹⁰ Serta, Menurut Mc. Ardle, dilakukan oleh

7 Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Prkatis*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), h. 59-60

8 Aep Kusnawan, *Ilmu Dakwah :Kajian Berbagai Aspek*, (Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 211

9 Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, (T.tp: Renika Cipta, 1990), cet. ke-2, h. 14-15

10 Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2002), cet.ke-1, hal. 162.

orang-orang yang secara konsekwen melaksanakan keputusan tersebut.¹¹ Oleh karena itu, orientasi pemberdayaan masyarakat Islam adalah *participation* dan *sustainable*, sehingga masyarakat menjadi subyek pembangunan.

Sementara itu, pembangunan menurut Sondang P. Siagian adalah sebagai suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.¹² Atau, menurut M. Ali Aziz pembangunan adalah upaya memberikan kontribusi pada aktualisasi potensi tertinggi kehidupan manusia.¹³ Menurutnya, pembangunan hendaknya ditujukan untuk mencapai standar kehidupan ekonomi yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar manusia.¹⁴

Pertumbuhan ekonomi sebagai orientasi dan *top down* yang dipilih menjadi strategi pembangunan menimbulkan berbagai masalah, karena paradigma pertumbuhan ekonomi lebih memusatkan perhatian pada upaya merangsang industrialisasi, seperti penggunaan teknologi, mengakibatkan kemakmuran pihak-pihak tertentu, seperti pengusaha bermodal dan pemerintah sebagai pemegang otoritas. Munculnya berbagai masalah sosial, ekonomi, dan mental masyarakat yang bermuara pada meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, karena masyarakat hanya dijadikan sebagai obyek pembangunan.

11 Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama, 2001), h. 3

12 Taliziduhu Ndraha, *Materi Pokok Pembangunan Masyarakat*, (Jakarta: Karunika Universitas Terbuka, 1986), cet. Ke-1, h. 1.5

13 M. Ali Aziz (ed)., *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi*, (Surabaya: Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, 2005), h. 5

14 Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, pakaian dan kesehatan, kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, mendapatkan penghormatan dan kesempatan untuk bekerja secara fair serta aktualisasi spiritual. Atau, konsep manusia seutuhnya (insan kamil) dalam paradigma Islam. *Ibid.*, h. 5

Perbedaan yang sangat esensial antara pemberdayaan masyarakat Islam dengan pembangunan yang selama ini berlangsung adalah tingkat peran serta masyarakat dalam tahapan-tahapan implementasi program pembangunan. Pemberdayaan masyarakat Islam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat mulai dari proses perencanaan atau menentukan program-program yang didasarkan pada potensi dan minat mereka secara mandiri sampai pada pelaksanaan serta monitoring, evaluasi, dan pemanfaatan hasil pembangunan. Allah SWT berfirman dalam surat al-Kahfi ayat 84:



Artinya: “Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu”. (QS. Al-Kahfi (18):84)

Sementara itu, pendekatan *top down* dalam pembangunan yang telah terjadi selama ini menjadikan masyarakat sebagai obyek, potensi dan minat yang ada pada masyarakat terkungkung dalam suatu sistem dan kebijakan pemerintah yang egois.

Istilah pembangunan yang menjadi paradigma dalam mencapai kesejahteraan bangsa perlu dilakukan rekonstruksi pendekatan dan orientasi. *Buttam up* dan atau *top down* bukanlah satu pendekatan baku yang dimiliki oleh satu model pemberdayaan atau pembangunan. Penggunaan pendekatan dan orientasi pembangunan tergantung pada *political will* para pemangku kepentingan.

Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi secara merata berpeluang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat apabila keterlibatan semua pihak diberi peluang sesuai dengan potensi dan kebutuhan. M.L. Jhingan berpendapat, hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan harus muncul dari masyarakat. Kekuatan eksternal hanya bersifat membantu bukan pengganti. Bantuan luar hanya bersifat mengawali dan bukan mempertahankan.¹⁵ Semangat membangun harus datang dari dalam, tanpa prakarsa masyarakat pembangunan akan percuma dan segera padam.¹⁶ Ketergantungan terhadap pihak luar menurut Prof. Paul Baran dalam Jhingan, akan memperlambat pertumbuhan ekonomi, tetapi agar pembangunan berlangsung secara *sustainable* harus berakar pada perekonomian internal.¹⁷

Pemerintah sebagai faktor eksternal merupakan satuan sistem paling umum yang mempunyai tanggung jawab mempertahankan sistem dan melakukan monopoli paktis mengenai kekuasaan.¹⁸ Posisinya yang sangat strategis dan mempunyai keahlian profesional dan fungsional dalam mekanisme perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, maka peranan birokrasi yang sangat penting adalah peran regulator (*public policy*).¹⁹

15 M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, terjemahan oleh D. Guritno, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2012), h. 41-42

16 *Ibid.*, h. 42

17 *Ibid.*, h. 42

18 Pariata Westra dkk., Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Goa, *Jurnal OTORITAS* Vol. IV No. 1 April 2014, h. 68-69, diakses pada 4 Agustus 2019

19 Masana Sembiring, *Budaya Dan Kinerja Organisasi*, (Bandung: Fokusmedia, 2012), h. 1

Regulasi pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan (*welfare*) adalah pembangunan yang diidamkan masyarakat. Menurut Riyadi yang dikutip oleh Totok Mardikanto, pemberdayaan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat serta individu-individu yang ada di dalamnya yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu.²⁰

Kesejahteraan yang ingin diraih bukanlah sekedar terpenuhinya kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan perumahan. Tetapi, menurut Tadaro dalam Totok Mardikanto, juga kesejahteraan dalam pengertian: *pertama*, tercapainya swasembada dalam pengertian mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, seperti: pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan rekreasi. *Kedua*, peningkatan harga diri, berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri, tidak tergantung pada siapapun, terlepas dari penindasan. *Ketiga*, diperolehnya suasana kebebasan, mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk mengembangkan diri untuk memilih alternatif yang baik dalam mencapai kesejahteraan yang terus-menerus.²¹

Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, kemandirian, dan kebebasan merupakan paradigma pembangunan yang perpihak pada masyarakat, sebagaimana yang dirumuskan oleh Chambers, yakni pembangunan yang

20 Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 3

21 *Ibid.*, h. 5

bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*”.²² Sejalan dengan itu, Indonesia bahkan *word bank* dalam Buletin Vol. 11 No. 4/Vol. 2 No. 1 Oktober-Desember 2001 menerapkan pemberdayaan sebagai ujung tombak dalam pengentasan kemiskinan.²³ *People-centered, participatory, empowering, and sustainable* menjadi pusat perhatian.

Provinsi Lampung memiliki empat kabupaten yang tergolong daerah tertinggal di Indonesia, yaitu Kabupaten Lampung Barat, Lampung Utara, Pesawaran, dan Way Kanan.²⁴ Menurut Kepala Badan PMPD Lampung, Sutoto di Bandar Lampung, tanggal 30 Maret 2013, jumlah desa di 14 kabupaten/kota yang mendapatkan program PNPM Mandiri sebanyak 2.379 desa. Dari data yang dimiliki Badan PMPD Lampung tahun 2014, sebanyak 486 desa masih tergolong desa tertinggal dari 2.435 desa dan tahun 2018.²⁵ Sedangkan, berdasarkan data BPS 2018 Desa Sukabanjari berstatus desa tertinggal.²⁶ Sementara Kepala Bappeda Provinsi Lampung Taufik Hidayat mengatakan, 30 desa secara proporsional di seluruh kabupaten/kota di Provinsi

²² *Ibid.*, h. 25

²³ *Ibid.*, h. 26

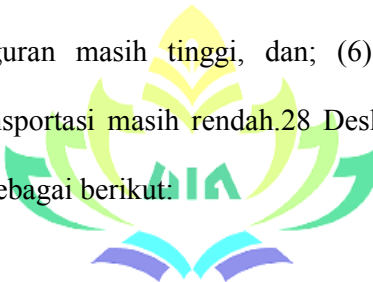
²⁴ Medi Danial, 183 Daerah tertinggal, https://www.academia.edu/4575172/Daftar_183_Daerah_Tertinggal, di akses pada tanggal 10 Juni 2016

²⁵ Fahrizal Daminto, Sekda Provinsi Lampung, <http://beritaanda.net/pemprov-lampung-tetapkan-19-desa-sangat-tertinggal-sebagai-locus-pengentasan-kemiskinan/>, diakses, pada 12 Desember 2019

²⁶ <https://hanibalhamidi.files.wordpress.com/2016/03/18>, diakses, pada Desember 2018

Lampung akan menjadi sasaran program percepatan pembangunan Desa Induk.²⁷

Salah satu desa yang termasuk dalam desa tertinggal adalah Desa Sukabanjar Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus. Menurut Ristiani, desanya tergolong desa tertinggal, karena: (1) letak wilayahnya di daerah pedalaman; (2) sebahagian wilayahnya dipinggir pantai yang terkesan kumuh; (3) kurang lebih 25% penduduknya tergolong miskin dengan katagori: (4) kualitas SDM masih rendah/mayoritas penduduk lulusan Sekolah Dasar; (5) tingkat pengangguran masih tinggi, dan; (6) imprastruktur sebagai akses ekonomi dan transportasi masih rendah.²⁸ Deskripsi tentang tingkat keluarga sejahtera adalah sebagai berikut:



Tabel 1

Tingkat Kesejahteraan Keluarga Masyarakat Desa Suakabnjar Tahun 2018

No	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah KK
1.	Keluarga Pra-Sejahtera	114
2.	Keluraga Sejahtera	338
3.	Keluarga Sejahtera 1	178
4.	Keluarga Sejahtera 2	72
5.	Keluarga Sejahtera 3	18

²⁷ Agung gazaldi, Reporter RRI Lampung, http://www.rri.co.id/bandar-lampung/post/berita/166008/daerah/pemprov_lampung_targetkan_2019_mendatang_tidak_ada_desa_tertinggal_di_lampung.html, diakses pada tanggal 10 Juni 2016

²⁸ Ristiani, Kepala Desa Sukabanjar, Interview, pada tanggal 5 Agustus, 2018

6.	Keluarga Sejahtera 3 Plus	1
Jumlah		720

Sumber: Monografi Desa Sukabanjar, dicatat pada 5 Agustus 2018

Data tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Lampung merupakan wilayah yang masih banyak memiliki desa tertinggal. Ini berarti, tren pemberdayaan dalam mencapai kesejahteraan hidup masyarakat masih dalam tahap proses mengentaskan kemiskinan. Mayoritas masyarakat desa Sukabanjar Kecamatan Kota Agung Timur dalam keadaan miskin, yakni 452 KK (62.78%) dalam katagori belum mampu memenuhi kebutuhan hidup secara wajar. Sementara itu, pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2014, tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana kerja pembangunan Daerah Tahun 2015, Bab II Pasal 3 ayat (3) berbunyi:

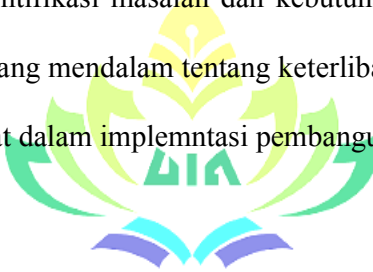
“Program prioritas bidang pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.²⁹

Hak-hak dasar masyarakat dan berkeadilan yang dimaksud pada Peraturan menteri di atas adalah sebagai berikut:

²⁹ Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian dalam Negeri, *Peraturan Menteri dalam Negeri No. 27 Tahun 2014, tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana kerja pembangunan Daerah Tahun 2015, Bab II Pasal 3 ayat (3)*, tahun 2014

1. Hak menentukan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Hak yang muncul karena adanya keyakinan bahwa masyarakat memiliki kemampuan memecahkan masalahnya sendiri.
2. Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk berusaha menciptakan lingkungan yang diinginkan dan menolak suatu lingkungan yang dipaksakan dari luar.³⁰

Masyarakat harus diyakini mampu bekerjasama secara rasional dalam bertindak untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan mereka.³¹ Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang mendalam tentang keterlibatan pemerintah atau pihak lain dan partisipasi masyarakat dalam implementasi pembangunan.



2. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- a. Pemerintah daerah mempunyai peran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud tanggungjawab terhadap kepemimpinannya.
- b. Komitmen pemerintah tentang pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta pembiayaan dalam pengentasan kemiskinan sangat besar, tetapi tidak diiringi dengan keseriusan kualitas pengelolaan.
- c. Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Sukabanjar tergolong tinggi.
- d. Tingkat pendidikan masyarakat mayoritas lulusan sekolah dasar.

³⁰ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33778/4/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 13 Juni 2016

³¹ Muhammad Ali Aziz (ed), *Op., Cit.*, h.7-8

- e. Keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat masih rendah.

2. Batasan Masalah

- a. Implementasi peran pemerintah daerah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat pada desa tertinggal di Provinsi Lampung.
- b. Implementasi peran pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat Islam pada desa tertinggal di Provinsi Lampung
- c. Tingkat kesejahteraan masyarakat pada desa tertinggal di Provinsi Lampung
- d. Pengaruh implementasi peran pemerintah daerah terhadap program pemberdayaan masyarakat Islam dan tingkat kesejahteraan masyarakat pada desa tertinggal di Provinsi Lampung.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian disertasi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh implementasi peranan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat pada desa tertinggal di Provinsi Lampung ?
2. Bagaimana pengaruh implementasi peranan pemerintah daerah terhadap program pemberdayaan masyarakat Islam, khususnya terhadap partisipasi masyarakat pada desa tertinggal di Provinsi Lampung ?

3. Bagaimana pengaruh pemberdayaan masyarakat Islam terhadap kesejahteraan (ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan spiritual) masyarakat pada desa tertinggal di Provinsi Lampung ?
4. Bagaimana pengaruh implementasi peranan pemerintah daerah dan program pemberdayaan masyarakat Islam terhadap kesejahteraan masyarakat pada desa tertinggal di Provinsi Lampung ?

3. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian disertasi ini berjudul: “Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan masyarakat Islam untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Tertinggal di Provinsi Lampung” akan fokus pada sisi-sisi lain dari masalah-masalah peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Islam yang telah diteliti oleh peneliti lain, seperti:

- 3.1. Penelitian yang dilakukan oleh Gleydis Susanti Oroh dengan judul “ peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat Islam di bidang pertanian di desa tumaratas kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat Islam desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Lahirnya otonomi daerah serta dalam era globalisasi, maka pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya. Penelitian yang bertujuan untuk

mengetahui dan menganalisis peranan Pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat di bidang pertanian serta mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa menghasilkan data, yakni: pemerintah sangat berperan dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat khususnya dibidang pertanian, seperti memberikan pelayanan pembinaan tentang usaha tani dan pelayanan pembinaan kemitraan.³²

3.2. Penelitian yang dilakukan oleh Modim Masita, Hi dengan Judul “peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat Islam (studi kasus: pemberdayaan masyarakat Islam dalam pengembangan pariwisata panorama pantai disa, kec. sahu, kabupaten halmahera barat)” yang fokus penelitiannya pada faktor-faktor yang mempengaruhi peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat Islam melalui pengembangan pariwisata, terutama tentang Optimalisasi informasi pariwisata, optimalisasi objek wisata, mobilisasi masyarakat, dan optimalisasi manajemen pengelolaan pariwisata.³³

3.3. Hasil penelitian Firana dengan judul “peranan lembaga pemberdayaan masyarakat Islam (LPM) dalam program penyelenggaraan pembangunan pemerintah di kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2011 (studi kasus di

32 Gleydis Susanti Oroh, Peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian di desa tumaratas kecamatan langowan barat kabupaten minahasa, Jurnal politico, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/6723>, diakses pada tanggal 10 Juni 2016

33 Modim Masita, peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat (studi kasus: pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata panorama pantai disa, kec. sahu, kabupaten halmahera barat), <http://repository.unhas.ac.id/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2016

Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam).³⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan peran LPM sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisor dalam pemberdayaan masyarakat Islam.

3.4. Masyarakat Desa Tertinggal: Kebutuhan, Permasalahan, Aset, dan Konsep Model Pemberdayaannya (Studi di Desa Jambu, Engkangin, Sendangmulyo & Mlatirejo Jawa Tengah, oleh Muhtar dkk.³⁵ Permasalahan dalam penelitian ini mengacu pada enam indikator sebagai permasalahan mendasar ketertinggalan daerah, yakni: persoalan perekonomian (kemiskinan penduduk), sumber daya manusia yang rendah, prasarana/infrastruktur, kemampuan/kekuatan keuangan daerah yang terbatas, aksesibilitas untuk mencapai pusat-pusat pelayanan dasar yang minim, serta karakteristik daerah yang rawan konflik sosial dan bencana alam.

Atas dasar permasalahan itu, maka penelitian ini fokus pada permasalahan: (a) kebutuhan, permasalahan, dan sumberdaya/ aset yang tersedia di daerah tertinggal; (b) program pembangunan apa saja yang pernah dilaksanakan; (c) model pemberdayaan masyarakat Islam daerah tertinggal. Dengan tujuan: (a) teridentifikasinya kebutuhan, permasalahan, dan sumberdaya/aset masyarakat daerah tertinggal; (b) teridentifikasinya program pembangunan yang pernah dilaksanakan; (c) tersusunnya model pemberdayaan masyarakat Islam daerah tertinggal. Jenis dan pendekatan penelitian deskriptif-kualitatif. Lokasi penelitian

34 Firina, Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Program Penyelenggaraan Pembangunan Pemerintah Di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2011 (Studi Kasus Di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam), E-Jurnal, diakses pada tanggal 10 Juni 2016

35 Muhtar dkk., Masyarakat Desa Tertinggal: Kebutuhan, Permasalahan, Aset, dan Konsep Model Pemberdayaannya (Studi di Desa Jambu, Engkangin, Sendangmulyo & Mlatirejo, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 16 No. 01, Tahun 2011, <http://puslit.kemosos.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2016

Ds. Jambu & Ds. Engkangin-Kalbar serta Desa Sendangmulyo & Ds. Mlatirejo-Jateng. Informan ditentukan secara purposive: perwakilan masyarakat, pemuka masyarakat (formal, informal), dan aparat instansi sosial kabupaten dan provinsi. Teknik pengumpulan data: panduan wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan diskusi kelompok. Data lapangan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian di Ds. Jambu dan Ds. Engkangin, dari sisi pemenuhan kebutuhan pokok dapat dikatakan terbatas karena terbatasnya asset. Sementara di Ds. Sendangmulyo dan Mlatirejo, kebutuhan pokok relatif terpenuhi karena tersedianya asset. Dari pemanfaatan sumberdaya (alam) di Ds. Jambu & Ds. Engkangin masih merupakan potensi. Dari sisi program pemberdayaan, di Ds. Jambu & Ds. Engkangin, belum dilaksanakan secara berkelanjutan. Program tersebut masih bersifat charitatif.

5. Pengembangan Masyarakat Desa Tertinggal Berbasis Keterpaduan Dan Otonomi Daerah (Studi Pemberdayaan masyarakat Islam di Kecamatan Gedangsari Gunung Kidul). Oleh S.Wisni Septiarti dan Widyaningsih.³⁶ Penelitian ini fokus pada: (a) kajian tentang bentuk pemberdayaan masyarakat Islam yang berorientasi pada keterpaduan dan otonomi daerah sehingga proses pembelajaran masyarakat dengan mengembangkan pemahaman dan pengetahuan mengenai masyarakat sendiri; (b) hambatan dalam implementasi pengembangan masyarakat dengan model keterpaduan dan otonomi daerah sebagai pendekatan pemberdayaan masyarakat Islam. Tujuannya adalah memperoleh gambaran mengenai potensi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat desa tertinggal. Dan, Menemukan pola

³⁶ S.Wisni Septiarti dan Widyaningsih Pengembangan Masyarakat Desa Tertinggal Berbasis Keterpaduan Dan Otonomi Daerah (Studi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gedangsari Gunung Kidul). <http://download.portalgaruda.org/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2016

pengembangan masyarakat yang dapat memberdayakan potensi yang menjadi bagian dari masyarakat desa tertinggal melalui *fokus discussion group*.

6. Pemberdayaan masyarakat Islam Desa Tertinggal Melalui Pendekatan Pendidikan, Ekonomi, Dan Lingkungan (Studi Implementasi di Desa Gedompol, Kec. Donorojo, Kabupaten Pacitan) Oleh: Eko Digdoyo, M.Hum. Penelitian ini berangkat dari analisis terhadap beberapa permasalahan yang di hadapi masyarakat adalah (a) Posisi serta keadaan geografis yang secara alamiah sulit untuk dilakukan perubahan; (b) Peran aparat desa yang kurang aktif dan komunikatif dalam menghadapi perkembangan karena keterbatasan pengetahuan; (c) Keterbatasan ekonomi masyarakat setempat, maka secara otomatis dampak perubahan pengetahuan pendidikan sulit untuk diwujudkan; (d) Pola pikir masyarakat setempat yang masih apatis bahwa proses pendidikan bukan termasuk investasi masa depan. Oleh karena itu, secara akademis kegiatan pemberdayaan dan pengabdian masyarakat menjadi salah satu rohnya suatu Perguruan Tinggi, sehingga tujuan kegiatan ini merupakan realisasi Catur Darma Perguruan Tinggi khususnya kegiatan Pemberdayaan dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sementara itu kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di wilayah tertinggal, sehingga dapat bermanfaat secara praktis. Secara sosial kegiatan ini setidaknya adalah bagian dari realisasi dari konsep “kesalehan” sosial.³⁷

37 Eko Digdoyo, Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal Melalui Pendekatan Pendidikan, Ekonomi, Dan Lingkungan (Studi Implementasi di Desa Gedompol, Kec. Donorojo, Kabupaten Pacitan), <http://www.lemlit.uhamka.ac.id/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2016

7. Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal (Studi Kasus Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat), oleh Abdul Wahid. Fokus kajian pada penelitian ini adalah: (a) tingkat ketimpangan potensi fisik dan tingkat pemerataan pembangunan antar wilayah yang terjadi di Kabupaten Garut; (b) kondisi lingkungan eksternal sebagai faktor peluang dan ancaman dan lingkungan internal sebagai faktor kekuatan dan kelemahan yang dihadapi Kabupaten Garut; (c) strategi apa saja yang harus disusun oleh stakeholders dalam pembangunan daerah tertinggal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang harus disusun oleh Stakeholders dalam pembangunan daerah tertinggal Kabupaten Garut. Perumusan strategi ini didukung dengan mengidentifikasi tingkat ketimpangan potensi fisik wilayah dan tingkat pemerataan pembangunan antar wilayah yang terjadi di Kabupaten Garut. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Data diolah dengan menggunakan analisis sistem hirarki potensi fisik wilayah (HFP), sistem hirarki tingkat pemerataan pembangunan, metode skalogram, sistem limpitan sejajar dan strategis, serta analisis matriks IFE, EFE, SWOT, dan QSP.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, maka penelitian disertasi ini lebih fokus pada: (1) pengaruh implementasi peranan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat pada Desa tertinggal Provinsi Lampung; (2) pengaruh implementasi peranan pemerintah daerah terhadap program pemberdayaan masyarakat pada Desa tertinggal di Provinsi Lampung; (3) pengaruh program pemberdayaan masyarakat Islam terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada Desa tertinggal di Provinsi Lampung, dan (4) pengaruh implementasi peranan pemerintah dan program

pemberdayaan masyarakat Islam terhadap kesejahteraan masyarakat pada Desa tertinggal di Provinsi Lampung.

4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang “Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan masyarakat Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Tertinggal di Provinsi Lampung” bertujuan untuk:

- a. Mendiskripsikan tingkat kesejahteraan masyarakat, peranan pemerintah, dan program pemberdayaan masyarakat Islam pada desa tertinggal di Provinsi Lampung.
- b. Mendiskripsikan pengaruh implementasi peranan (kebijakan) pemerintah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada desa tertinggal di Provinsi Lampung, sehingga ditemukan teori-teori tentang pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), dan Sumber Daya Kapital (SDK) yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
- c. Mendiskripsikan pengaruh implementasi peranan pemerintah daerah terhadap program pemberdayaan masyarakat Islam pada desa tertinggal di Provinsi Lampung.
- d. Mendiskripsikan pengaruh program pemberdayaan masyarakat Islam terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada desa tertinggal di Provinsi Lampung.

- e. Mendiskripsikan pengaruh implementasi peranan pemerintah dan program pemberdayaan masyarakat Islam terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada desa tertinggal di Provinsi Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian disertasi ini diharapkan akan bermanfaat, terutama bagi:

- a. Secara teoritik, studi ini diharapkan memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori-teori pemberdayaan masyarakat Islam tentang peranan lembaga-lembaga pemberdayaan, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat Islam, sehingga, program pemberdayaan masyarakat Islam berlangsung dengan efektif dan efisien.
- b. Secara empirik, studi ini diharapkan memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat Islam, baik pemerintah dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan swasta, khususnya desa tertinggal, sehingga berbagai pihak dapat berpartisipasi sesuai proporsinya.

5. Sistematika Penulisan

Bab Pendahuluan (Bab I). Pada bab ini ditulis tentang teoritik dan realitas empiris yang ditemukan pada obyek penelitian, sehingga menjadi dasar yang melatar belakangi pemikiran dilakukan penelitian, identifikasi permasalahan-permasalahan, batasan, kemudian rumusan pertanyaan penelitian,

yang akan dibuktikan melalui penelitian disertasi ini. Bab pendahuluan, juga menyajikan hasil-hasil penelitian terdahulu, rumusan tentang tujuan, dan kegunaan penelitian. Bab ini merupakan landasan dalam merumuskan teori bab II dan bab-bab pembahasan berikutnya, seperti merumuskan metodologi penelitian, mengumpulkan, menganalisa data melalui uji hipotesis, dan pembahasan pada bab IV, serta dasar dalam membuat kesimpulan dan saran pada bab V.

Bab II, adalah bab Teori. Pada bab teori, dibagi menjadi subbab kajian. Kajian sub bab A, penulis menguraikan secara lengkap dan sistematis tentang teori-teori pemberdayaan masyarakat Islam, meliputi pengertian, prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat Islam, macam-macam pemberdayaan masyarakat Islam, metode pemberdayaan masyarakat Islam, tahapan pemberdayaan masyarakat Islam dan faktor pendukung penghambat pemberdayaan masyarakat Islam, baik yang bersumber dari ajaran Islam maupun teori-teori umum. Sub bab B, mengkaji tentang teori-teori kesejahteraan sosial, meliputi langkah-langkah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial peraturan perundang-undangan tentang kesejahteraan sosial. Sub bab C, peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Islam, meliputi teori peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Islam, kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Pada bagian D, juga mengidentifikasi teori-teori tentang pengaruh peran pemerintah dan pemberdayaan masyarakat Islam terhadap kesejahteraan masyarakat, baik yang bersumber dari pendapat para ahli maupun bersumber

dari hasil penelitian. Bagian terakhir pada bab II adalah rumusan tentang kerangka fikir sebagai kerangka acuan dalam penulisan penelitian disertasi ini.

Bab III, bab Metode Penelitian. Pada bagian A, diuraikan penetapan pendekatan, tempat, dan waktu penelitian. Bagian B, diuraikan tentang Metode Survei, meliputi desain penelitian, populasi sampel, instrumen variabel (definisi konseptual dan operasional, kisi-kisi kuesioner, uji validitas dan realibilitas), analisa kuantitatif, dan hipotesis statistik. Pada bagian C dibahas tentang Metode Kualitatif, baik tentang sumber dan teknik pengumpulan data maupun analisa data.

Bab IV, pada bagian A, merupakan deskripsi data tentang profil obyek penelitian. Bagian B, pembahasan tentang deskripsi data kuantitatif dan kualitatif. Bagian C, uji hepotesis antat variabel. Bagian D, adalah mengkaji hasil deskripsi data kuantitatif dan kualitatif.

Bab V adalah bab Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan adalah jawaban dari permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan pada sub bab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran yang berdasarkan pada kekurangan obyektif yang telah terhimpun melalui kuesioner, interview, observasi, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data penelitian.

BAB II

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA TERTINGGAL

A. Pemberdayaan Masyarakat Islam

Kesenjangan pendapatan antara masyarakat kota dan desa disinyalir akibat dari pendekatan program pembangunan dinegeri ini. Pendekatan tersebut, berorientasi pada hasil dan menjadikan masyarakat sebagai obyek pembangunan, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakatpun menjadi tidak merata. Oleh karena itu, dalam melaksanakan program pembangunan, pemerintah merubah pendekatan yang berorientasi pada proses dan menempatkan masyarakat sebagai subyek atau pelaku pembangunan. Diharapkan akan terjadi pemerataan pembangunan dan pendapatan, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat akan terjamin.

Teori pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan konsep Islam, bahwa Islam adalah agama pemberdayaan. Dalam pandangan Islam, pemberdayaan merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai agama perubahan.³⁸ Dalam konteks Indonesia, masyarakat Islam sebagai penghuni mayoritas bangsa masih terlalu jauh dari segala keunggulan bila dibandingkan dengan sesama umat manusia dari Negara-negara lain. Fakta ini menuntut adanya pemberdayaan yang sistematis dan terus-menerus untuk melahirkan masyarakat yang berkualitas.

³⁸Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Syafe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 41

Situasi ekonomi masyarakat Islam Indonesia bukan untuk dipersoalkan, melainkan untuk dicarikan jalan pemecahannya. Untuk keluar dari himpitan ekonomi ini, diperlukan perjuangan besar dan gigih dari setiap komponen umat. Setiap pribadi muslim di tantang untuk lebih keras dalam bekerja, berkreasi, dan berwirausaha, lebih-lebih dalam bekerja sama, komunikatif dalam berinteraksi, lebih skillful dalam memfasilitasi jaringan kerja, dan lebih profesional dalam mengelola potensi-potensi dan kekuatan-kekuatan riil ekonomi umat, Untuk bisa keluar dari himpitan ekonomi seperti sekarang ini. Di samping penguasaan terhadap *life skill* atau keahlian hidup, keterampilan berwirausaha, dibutuhkan juga pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang selama ini tidak pernah dilirik.

Dengan demikian, pengembangan atau pemberdayaan masyarakat Islam merupakan model empiris pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam dimensi amal saleh, dengan titik tekan pada pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat. Sasaran individual yaitu setiap individu muslim, dengan orientasi sumber daya manusia. Sedangkan sasaran komunal adalah kelompok atau komunitas muslim, dengan orientasi pengembangan sistem masyarakat. Dan sasaran institusional adalah organisasi Islam dan pranata sosial kehidupan, dengan orientasi pengembangan kualitas dan Islamitas kelembagaan.

Dengan demikian, perlu pembahasan yang lebih mendalam tentang teori-teori pemberdayaan masyarakat dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat.

1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat Islam

Pengembangan dan pemberdayaan merupakan dua kata yang mirip tetapi bisa dibedakan. Pemberdayaan bisa diartikan sebagai sebuah yang khusus, sedangkan pengembangan lebih umum dari makna pemberdayaan. Pembahasan mengenai pemberdayaan sudah ada sejak lama, namun para ilmuwan belum menemukan formulasi jitu dalam mewakili makna dari pemberdayaan, artinya belum ada definisi yang tegas mengenai konsep tersebut. Namun demikian, bila dilihat secara lebih luas, pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan daya, kemampuan dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya.

Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan, secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan dalam pengertian lain, pemberdayaan adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat ini berarti masyarakat diberdayakan untuk memilih suatu yang bermanfaat bagi dirinya.³⁹ Menurut Riza Risyanti dan Roesmidi, Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. ⁴⁰ Sedangkan menurut Anita Fauziah, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdaya suatu kondisi atau keadaan yang mendukung adanya kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah suatu upaya

³⁹ *Ibid.*, h. 41-42

⁴⁰ Riza Risyanti dan Roesmidi, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2006, pengertian_pemberdayaan.pdf), h. 1-2

untuk meningkatkan kemampuan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.⁴¹

Menurut Robinson dalam Fauziah, pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial, suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreativitas dan kebebasan bertindak.⁴² Menurut Narayan, pemberdayaan adalah memperluas kepemilikan dan *capabilities* orang-orang miskin supaya dalam berpartisipasi, dengan bernegosiasi, mempengaruhi, mengawasi, dan meminta pertanggungjawaban lembaga/institusi yang mempengaruhi kehidupan mereka.⁴³ Dan, menurut Zubaedy Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.⁴⁴

Dengan demikian, masyarakat berdaya adalah masyarakat yang memiliki salah satu atau lebih variabel, diantaranya :

- 1). Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan perekonomian yang stabil.
- 2). Memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan.
- 3). Memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar.

41 Anita Fauziah, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Depag RI, Malang, 2009), h. 17

42 Anthony Gideens, *Sociology*, (Cambridge: Polity Press, 1991), h. 356

43 Narayan, *Empowerment and Poverty Reduction*, (Washington DC: The Word Bank, 2002), h. xviii

44 Zubaedy, *Pengembangan Masyarakat, Wacana dan Praktek*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 24

4). Memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga eksistensi bangsa dari bangsa atau negara lain.⁴⁵

Menurut Robert Chambers dalam Ginanjar Kartasasmita, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Pembangunan bersifat *people-centered* (berpusat pada rakyat), partisipator (partisipasi), *empowering* (pemberdayaan), dan *sustainable* (keberlangsungan).⁴⁶ Menurut Sutarso dalam Abu Hurairah, pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan kemampuan, motivasi, dan peranserta semua unsur masyarakat sehingga menjadi unsur yang *sustainable* untuk mendukung semua bentuk usaha kesejahteraan sosial.⁴⁷

Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang saling terkait antara proses yang satu dengan proses yang lainnya. Oleh karena itu, menurut Soetomo, dua hal yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yakni proses pemberian kewenangan dan proses pengembangan kapasitas masyarakat.⁴⁸ Dengan demikian, proses yang saling berhubungan itu di fokuskan pada pemberian wewenang dan pengembangan kapasitas masyarakat agar terciptanya perubahan sosial yang menyeluruh.

⁴⁵ Nur Mahmudi Ismail, Strategi Pemberdayaan Ummat dan Pencetakan SDM Unggul, dalam Hotmatua Daulay dan Muyanto (ed), *Membangun Sumber Daya Manusia dan Kapabilitas Teknologi Ummat*, (Bandung, ISTECS, 2001), h. 28

⁴⁶*Empowerment* bukan sekedar hanya memberikan kesempatan menggunakan sumber daya alam dan dana pembangunan saja, tetapi *empowerment* lebih merupakan upaya untuk mendorong masyarakat untuk mencari cara menciptakan kebebasan dalam partisipasi, Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat; Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta, Cesindo, 1996), h. 142

⁴⁷ Abu Hurairah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2008), hal.97

⁴⁸Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011), hal. 88

Allah SWT berfirman dalam surah al-Kahfi ayat 84, yang berbunyi:

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبِيلًا ٨٤

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu. (QS. al-Kahfi (18) : 84)

Ayat di atas, menjelaskan bahwa, Allah SWT telah menyediakan bumi dan seisinya sebagai media atau fasilitas serta kewenangan yang seluas-luasnya mencapai kesejahteraan hidup. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat peran aktif berbagai pihak terutama pemerintah yang memiliki kewenangan melalui pemikiran, konsep, dan manajemen yang dituangkan dalam kebijakan-kebijakan. Oleh karena itu, pemberdayaan menurut Byars dan Rue, dalam Direktorat Jendral Pendidikan Islam dan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Depag RI adalah merupakan bentuk desentralisasi yang melibatkan pemberian tanggung jawab pada bawahan dalam membuat keputusan. Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya: (1) meningkatkan kemampuan masyarakat (*to give ability or enable*) melalui pelaksanaan berbagai kebijakan program pembangunan, sehingga kehidupan masyarakat dapat mencapai sesuai yang diharapkan, dan (2) meningkatkan kemandirian masyarakat melalui *to give authority* sebagai upaya membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Atau, pemberdayaan masyarakat berarti memampukan dan memandirikan masyarakat.⁴⁹

49 Direktorat Jendral Pendidikan Islam dan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Depag RI, *Pemberdayaan Masyarakat Pendekatan RRA dan PRA*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), Malang, 2009, h. 18-19

Dalam Al-Qur'an, Allah menjelaskan bahwa manusia di dorong untuk berusaha (*mu'amalah*) tanpa mengabaikan ibadah *mahdhoh*, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah:10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۰

Yang artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Jumu'ah (62): 10)

Dijelaskan juga dalam surat Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا
اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ
۝ ۱۹۸

Artinya: “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masjidil haram. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. (QS. Al-Baqarah (2) : 198)

2. Matra (Bidang) Pemberdayaan Masyarakat Islam.

Ada tiga matra atau bidang pemberdayaan yang harus diperjuangkan dalam konteks keumatan masa kini adalah pemberdayaan dalam tataran ruhaniah, intelektual, dan ekonomi.⁵⁰

- a. Pemberdayaan bidang ruhaniah. Agus Efendi berpendapat, pergeseran nilai atau degradasi moral masyarakat Islam saat ini, khususnya mayoritas generasi mudanya begitu telanjang terkooptasi oleh budaya barat yang cenderung negatif dan tidak sejalan bahkan bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan agama, dilembaga-lembaga pendidikan formal pada berbagai lini tidak mampu menanamkan nilai-nilai ilahiyah pada peserta didiknya.
- b. Pemberdayaan bidang intelektual. Disinyalir, umat Islam tidak terkecuali di Indonesia mengalami kejumudan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersandar pada iman dan takwa. Untuk itu, pemberdayaan intelektual menjadi sangat *urgent* untuk diperjuangkan.
- c. Pemberdayaan bidang ekonomi. Jumlah penduduk yang demikian besar dan mayoritas beragama Islam, sehingga besarnya jumlah masyarakat yang terbelenggu kemiskinan adalah masyarakat beragama Islam. Berbagai upaya pemerintah untuk menekan jumlah kemiskinan, tetapi belum menunjukkan hasil yang signifikan. Untuk itu, perlu kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Pemberdayaan masyarakat seringkali dilakukan secara parsial atau tidak komprehensif, bahkan terfokus pada pemberdayaan ekonomi untuk

⁵⁰Nani Machendrawaty dan Agus Ahmad Syafe'i, *op. cit.*, h. 44.

meningkatkan pendapatan. Sehingga, kualitas sumberdaya manusia dan lingkungan kerap kali terabaikan. Oleh karena itu, Sumadyo dalam Aprelia Theresia dkk merumuskan konsep tri bina yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat Islam, yakni bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan.⁵¹ Menurut Totok Mardikanto dan Sri Sutarni, bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan akan terwujud apabila didukung oleh efektivitas kelembagaan yang menaunginya.⁵² Sedangkan menurut Amrullah Ahmad dalam Nanih, pemberdayaan umat Islam adalah system tindakan nyata yang menawarkan alternatif pemecahan masalah umat dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam persepektif Islam.⁵³ Atau menurut Imang Mansur Burkah dalam Nanih pemberdayaan masyarakat adalah upaya membangkitkan berbagai potensi umat Islam kepada kondisi yang lebih baik dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi.⁵⁴

Orientasi pembangunan nasional adalah kesejahteraan masyarakat kedepan. Secara konseptual, Koentjaraningrat merumuskan semangat pembangunan nasional, setiap warga negara harus berorientasi masa depan, memiliki keinginan bereksplorasi dan berinovasi, mengejar prestasi, mengembangkan mentalitas berusaha, percaya diri dan disiplin tinggi.⁵⁵ Dengan demikian, penguatan sumber daya manusia (SDM) dalam pemberdayaan

51 Aprelia Theresia dkk., *op., cit.*, h. 154

52 Totok Mardikanto dan Sri Sutarni, *Redefinisi dan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian*, (Solo-Sukoharjo: Prima Theresia Pressindo, 2003), h. 113

53 Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *op., cit.*, h. 41

54 *Ibid.*,

55 Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1978), h.

menjadi urgent dan menjadi prioritas, karena SDM merupakan modal utama dalam pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, penguatan kemampuan SDM seyogyanya berorientasi pada: (1) penguatan kemampuan personal (*personality oprach*) yang berorientasi pada penguatan kepribadian, kemampuan kerja, dan profesionalitas; (2), pengembangan pengetahuan lembaga pemberdayaan masyarakat; (3) pengembangan kuantitas dan kualitas; dan (4) meningkatkan interaksi antar kelembagaan.⁵⁶ Sehingga, manusia bukan hanya diposisikan sebagai sumberdaya, tetapi juga sebagai subbyek yang mengatur program pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan SDM merupakan bagian integral dari pengembangan bidang pendidikan. Pemberdayaan bidang pendidikan merupakan upaya pemberantasan buta huruf, buta angka, dan buta pengetahuan melalui pendidikan formal dan non, sehingga masyarakat memiliki kemampuan dan keberanian untuk melakukan perubahan dalam segala bidang. Karena, sesungguhnya pemberdayaan merupakan proses pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas, dan kebebasan bertindak.⁵⁷ Masyarakat yang telah mencapai kemandirian secara kolektif merupakan akumulasi dari pengetahuan, keterampilan dan sumberdaya lainnya tanpa ketergantungan

⁵⁶ Totok Mardikanto dan PoerwokoSoebianto, *op., cit.*, , h. 114

⁵⁷ Buddy Robinson, *Strategies for Community Empowerment: Direct Action and Transformative Approaches to Social Change Practice*, (New York EmText, 1994), h. 34

terhadap pihak lain, khususnya bantuan pihak luar.⁵⁸ Pendidikan yang berkenaan dengan tri bina (bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan) sebagaimana pendapat Mardikanto di atas, dapat dicapai melalui pendidikan formal dan pendidikan nonformal atau pendidikan berbasis masyarakat. ⁵⁹ SDM yang mandiri dalam pengetahuan dan keterampilan diharapkan akan mampu merealisasikan tercapainya kesejahteraan, tidak terkecuali kesejahteraan ekonomi.

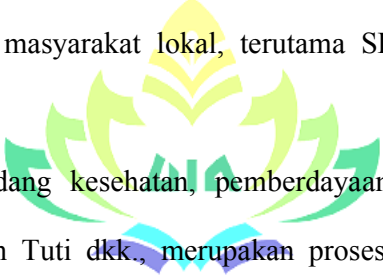
Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan kepemilikan faktor-faktor produksi, distribusi, dan konsumsi.⁶⁰ Menurut Sumodiningrat dalam Erni Febrina, konsep pemberdayaan ekonomi adalah sebagai berikut: 1) perekonomian rakyat adalah perekonomian nasional yang diselenggarakan oleh rakyat berakarkan potensi dan kekuatan rakyat secara luas untuk menjalankan perekonomian mereka sendiri; 2) pemberdayaan ekonomi rakyat adalah upaya mencapai ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing yang tinggi melalui perubahan struktural; 3) perubahan structural adalah perubahan ekonomi tradisional menjadi ekonomi modern, perubahan ekonomi lemah keekonomi kuat, dari ketergantungan ke ekonomi mandiri; 4) pemberdayaan ekonomi rakyat tidak cukup dalam tataran peningkatan produktivitas dengan memberikan kesempatan dan bantuan modal, tetapi harus

⁵⁸ Payne, *Manajemen Strategik: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1999), h.26

⁵⁹ UU No. 20 tahun 2003, Pasal 26 ayat 1-7

⁶⁰Erni Febrina Harahap, Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian Nasional yang Tangguh, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 3 No. 2 2012, https://www.academia.edu/31586156/pemberdayaan_masyarakat_dalam_bidang_ekonomi, diakses, pada 15 Maret 2020

ada jaminan kerjasama dan kemitraan; 5) kebijakan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat berorientasi pada: pemberian peluang dan akses asset produksi terutama permodalan, memperkuat transaksi dan kemitraan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, memperkuat industry kecil, mendorong tumbuhnya wirausaha baru; 6) kegiatan pemberdayaan masyarakat, mencakup peningkatan: 1) akses permodalan, akses SDM, sarana prasarana pendukung pengembangan ekonomi masyarakat lokal.⁶¹ Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi tidak hanya memberi modal dan kesempatan, tetapi perlu ada penguatan-penguatan terhadap berbagai potensi masyarakat lokal, terutama SDM, SDA, dan kelembagaan lokal.



Dalam bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat menurut Wiku Adisasmito dalam Tuti dkk., merupakan proses yang dilakukan masyarakat, baik dengan maupun tanpa bantuan pihak lain untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan aspek lainnya yang secara langsung ataupun tidak berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat.⁶² Untuk itu, menurut Wiku, ada empat hal utama yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan kesehatan, yakni aksesibilitas informasi, keterlibatan dan partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan kapasitas organisasi lokal.⁶³ Secara eksplisit termaktub dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dijelaskan, bahwa pembangunan kesehatan harus ditujukan untuk meningkatkan kesadaran,

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² Tuti Restuastuti dkk., Analisis Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Analysis of Community Empowerment in Health Sector, <https://www.researchgate.net/publication/320176482>, diakses pada 20 Maret 2020

⁶³ *Ibid.*,

kemauan, dan kemampuan hidup masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya masyarakat. Dan, setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan, setiap warga negara mempunyai hak yang sama memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. 64

Realisasi komitmen pemerintah terhadap UU No. 36 Tahun 2009 tersebut, pada 3 November 2014 dikeluarkan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang bertujuan untuk menjamin masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS dan memberikan layanan preventif, promotif, dan deteksi dini secara intensif dan terintegrasi. Langkah strategis pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan dengan cara pemanfaatan potensi atau sumber daya, baik sumber dana, tenaga, dan budaya berbasis kearifan lokal. 65

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses perubahan yang komprehensif antara bidang SDM dan atau pendidikan, bidang ekonomi, bidang kesehatan, dan bidang spiritual. Pemberdayaan merupakan pendekatan pembangunan untuk mengembangkan masyarakat yang didasari theisme religius yang benar. Karena, theisme yang didasarkan pada intelektualitas dan spritualitas yang benar akan membawa individu, keluarga, bahkan masyarakat

64 *Ibid.*,

65 Barbara R Sarason dan Pierce G Irwin, *Social Support : An Interactional View.* John & Sons, 1990.

terhindar dari jebakan materialistik.⁶⁶ Melalui media masjid, musholla, dan majelis-majelis ta'lim, masyarakat mengkaji dan mendalami ilmu pengetahuan tentang spiritualitas.

3. Subyek (Fasilitator) dan Obyek (Penerima Manfaat) Pemberdayaan Masyarakat

Singkronisasi antara dakwah dengan pemberdayaan masyarakat merupakan keniscayaan. Karena, umat Islam merupakan bagian dari obyek sekaligus sebagai obyek pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dalam bidang spiritual merupakan bagian dari matra/bidang pemberdayaan masyarakat. Antara dakwah dan pemberdayaan masyarakat mempunyai esensi yang sama, yakni mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, aktivitas dakwah tidak terbatas pada dakwah lisan, tetapi karya nyata sebagai jbaran dari konsep *dakwah bil hal* jauh lebih penting. Masyarakat membutuhkan peran serta dan karya nyata yang bernilai Islami, seperti; rajin ibadah, cerdas, *etos prestatif*, jujur, sederhana, dan bertanggung jawab.

Islam telah mengisyaratkan tentang subyek pembedayaan masyarakat dalam al-Qur'an surat ar-Ra'd ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ
مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا
لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝ ۱۱

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki

⁶⁶ Suryadi, Dekonstruksi Epistemologi Ilmu-Ilmu Sosial: Sebuah Keniscayaan. Interaktif: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial "Pluralisme", Vol.I, Nomor 2, Juni 2010, h. 226-232. Malang, Pusat Studi Pengembangan Ilmu Sosial Terapan Universitas Brawijaya.

keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. Ar-Ra'ad (13): 11

Menurut Quraisy Shihab, beberapa hal yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan dasar Qur'ani tentang pemberdayaan masyarakat dalam surat ar Ra'ad ayat 11, yakni berkaitan dengan pelaku (*subyek*), sasaran (*obyek*), dan tahapan pemberdayaan masyarakat. Pertama, kata kaum dalam ayat tersebut mengisyaratkan tentang perubahan sosial, bukan perubahan personal. Kedua, kata “*kaum*” berarti umum, tanpa membedakan suku, ras, dan agama tertentu. Ketiga, subyek pemberdayaan ada dua, yakni, Allah SWT sebagai pelaku perubahan dari sisi luar (lahiriah) masyarakat dan manusia sebagai pelaku dari dalam (*ma bi anfusihim*). Perubahan yang terjadi atas ikut campur tangan Allah atas banyak hal, seperti; kekayaan dan kemiskinan, penyakit dan sehat, kehinaan dan kemulyaan. Keempat, pemberdayaan harus dimulai dari perubahan sikap dan motivasi (batiniyah), karena sikap dan motivasi menumbuhkan aktivitas dan kreativitas.⁶⁷ Dengan demikian, da'i pembangunan tidak hanya terbatas pada peran *motivator* dan *dinamisator*, tetapi sebagai *fasilitator* sekaligus subyek pembangunan.

Berdasarkan peran yang diemban seorang da'i kontemporer sebagaimana diuraikan di atas, da'i dalam perspektif pemberdayaan masyarakat dikenal dengan istilah *change agent*, *fasilitator*, dan *community worker*. Mereka adalah tenaga profesional yang ditunjuk pemerintah dan atau pihak swasta, serta tenaga relawan yang secara sukarela memberdayakan masyarakat disekitarnya.⁶⁸

Subyek pemberdayaan masyarakat disebut juga dengan istilah pendamping desa. Mereka adalah tenaga profesional yang mempunyai tugas:

67 M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Vol. 6*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), h. 231-236

68 Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *op., cit.*, h. 139-140

- a. Mendampingi Desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring (supervisi) pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - b. Mendampingi Desa dalam pengelolaan pelayanan sosial, pengembangan ekonomi Desa, pendayagunaan SDM dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - c. meningkatkan kapasitas Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa.
 - d. Memfasilitasi pengorganisasian kelompok-kelompok masyarakat Desa.
 - e. meningkatkan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan merekrut kader-kader baru.
 - f. Mendorong pembangunan yang partisipatif, dan
 - g. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁶⁹

⁶⁹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 3 tahun 2015, bab II, Pasal 12 Tentang Pendampingan Desa

Sementara itu, obyek atau penerima manfaat pemberdayaan masyarakat dalam perspektif surat ar-Ra'ad ayat 11 terdahulu adalah masyarakat secara umum tanpa membedakan latar belakang suku, bangsa, dan agama. Allah berfirman dalam Q.S. Saba' : 28:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٨

Artinya: “dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. (QS. As-Saba' (34) : 28)

Walaupun demikian, program pemberdayaan masyarakat merupakan aktivitas yang bertujuan melakukan perubahan kepada keberdayaan, sehingga tidak memungkinkan apabila dilakukan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, yang dijadikan obyek pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat dengan skala prioritas. Dari pandangan sosiologis, obyek pemberdayaan masyarakat dalam perspektif dakwah adalah masyarakat terasing, pedesaan, termarginalkan. Sedangkan dari segi profesi adalah masyarakat pedagang, buruh, dan petani yang miskin.⁷⁰

4. Metode Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia dapat kita lihat dan rasakan. Mulai dari fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, gedung-gedung pemerintah yang besar dan bertingkat, bergantinya pasar-pasar tradisional yang menjadi medium masyarakat bertransaksi untuk pemasaran hasil pertanian menjadi pasar swalayan

⁷⁰Arifin, *Psikologi Dakwah* (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), h. 13-14

(pasar modern) yang menawarkan produk serba mewah dan mahal sampai pada pembangunan infra struktur dan fasilitas pertanian dan prianan dengan dalih demi kepentingan masyarakat banyak. Ditambah lagi dengan begitu pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang bersifat sekuler.

Disisi lain, pembangunan yang sangat membanggakan dan menempatkan bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain di belahan dunia itu menjebak masyarakat kepada sikap dan pola hidup konsumtif dan serba instant. Dampaknya adalah masyarakat kita yang mayoritas memiliki kemampuan ekonomi menengah ke bawah tetap mengalami keterbelakangan dalam segala bidang. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, bentuk-bentuk keterbelakangan yang dialami mayoritas masyarakat Indonesia adalah: Pertama, sifat masyarakat yang tradisional, yakni masyarakat yang terikat oleh nilai-nilai primordial yang berusaha mempertahankan apa yang sudah ada, Kedua, rendahnya system dan mutu pendidikan. Ketiga, rendahnya pendapatan, modal dan keterampilan sehingga kemiskinan tidak jelas ujung pangkalnya. Keempat, penambahan penduduk yang tidak merata dan tingkat urbanisasi yang sangat tinggi. Kelima, tingginya pertumbuhan penduduk usia kerja yang tidak diimbangi oleh penyediaan lapangan kerja. Keenam, tidak adanya kestabilan politik sehingga pengelompokan kekuatan-kekuatan politik yang saling mendiskreditkan semakin membahayakan.⁷¹ Bahkan mempunyai kecendrungan untuk mengabaikan norma-norma cultural (adat) dan norma-norma agama yang berlaku dalam masyarakat

⁷¹ Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Pemikiran tentang Tiori dan Strategi Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), cet.ke- ..., h. 7-9

Sikap mengabaikan norma-norma adat dan agama, bukan lagi menjadi fenomena (gejala) pada bangsa kita, tetapi sudah menjadi realitas. Prilaku-prilaku *patologi sosial* (prilaku menyimpang) menjadi sajian utama media masa dan sekaligus menjadi konsumsi masyarakat kita setiap harinya. Ini berarti apa yang pernah diungkapkan oleh Adi Sasono benar-benar terjadi. Beliau mengatakan, yang perlu diwaspadai sebagai akibat pembangunan adalah terjadinya perubahan keyakinan, sikap dan pola hidup yang mengarah pada perubahan yang berdampak negatif.⁷²

Dampak negatif keberhasilan pembangunan bangsa ini merupakan salah satu kesalahan strategi pembangunan yang selama ini diterapkan. Strategi pembangunan dengan menggunakan pendekatan *top down* yang menjadi kiblat pemerintah dan kaum kapitalis, ternyata mempertajam kesenjangan antara golongan dalam masyarakat, baik antara penguasa dengan rakyat maupun antara sikaya pemilik modal dengan simiskin dan kaum buruh. Dan dampak yang paling memprihatinkan akibat pendekatan *top down*, diantaranya; Pertama, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pelaku (subyek) pembangunan yang selalu melakukan manipulasi keuangan dan kualitas hasil pembangunan. Kedua, program pembangunan yang selalu ditetapkan dari atas kebawah, dalam pengertian pemerintah tidak pernah memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan yang sebenarnya merupakan kewajiban dan hak masyarakat menjadikan masyarakat bersifat pasif. Mereka selalu menunggu dan menerima, malas tidak punya inisiatif untuk maju dan membangun dirinya. Ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan.

72 Adi Sasono, *Solusi Islam atas Problema Umat*, (Jakarta: Gema Insani, 1998)

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan yang secara fisik tampak secara kasat mata tidak mampu memecahkan permasalahan yang dialami dan dihadapi masyarakat. Bahkan, menambah persoalan baru dan menjadi pekerjaan rumah bagi semua komponen bangsa ini, baik pemerintah dan elit politik maupun masyarakat pada umumnya.

Bila kita mengkaji pembangunan sebagai sebuah system, maka banyak faktor yang menyebabkan keberhasilan pembangunan sebuah bangsa. Diantaranya, pemerintah dan *good willnya*, masyarakat baik sebagai subyek maupun sebagai obyek pembangunan, kebijakan-kebijakan yang mendukung, modal yang cukup dan pengelolaannya yang efektif dan efisien, strategi, pendekatan dan metode yang digunakan. Faktor-faktor tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu saja tidak ada atau tidak tepat dalam pemilihan dan penggunaannya, dapat dipastikan pembangunan akan tetap berjalan, tetapi tidak efektif dan terarah. Apalagi pembangunan yang terlepas sama sekali dari nilai-nilai keagamaan atau moral, maka manusia pembangunan dan hasil pembangunannya pun akan menyentuh aspek kemanusiaan. Pembangunan yang menyentuh aspek kemanusiaan adalah pembangunan yang dilakukan oleh para da'i pembangunan yang tolak ukur berpikirnya Qur'ani dan dapat diukur melalui ketakwaannya.⁷³ Artinya, seorang da'i dan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan yang bekerja dilandasi ketauhidan dapat dipridiksi hasilnya pun akan menjadi Islami, dalam pengertian tidak mempunyai tendensi kepentingan pribadi atau kelompok apalagi merugikan orang lain.

⁷³ M. Zainuddin Fananie, *Pembangunan Berwawasan Martabat Manusia* (ed), (Surakarta: Muhammadiyah University, 1996), cet.ke1, h. 187-188

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah faktor pemilihan dan penggunaan metode yang tepat sesuai dengan karakter subyek, obyek, materi, tujuan, dan media yang digunakan dalam pembangunan bertabat manusia (Islami). Memang, metode bukanlah satu-satunya faktor penentu keberhasilan dakwah (pembangunan), tetapi metode menjadi penting bagi da'i pembangunan. Karena, metode menentukan isi dan cara menyajikan pesan.⁷⁴ Metode merupakan alat bagi da'i dalam berinteraksi dengan masyarakat, baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan, sehingga masyarakat penerima manfaat tergugah dan mempunyai pemahaman serta pengalaman dalam menyelesaikan masalah sesuai kemampuan sendiri dengan menggunakan petunjuk dan pedoman-pedoman teknis yang tersedia.⁷⁵

Karena metode pemberdayaan masyarakat merupakan alat bagi da'i pembangunan atau fasilitator untuk membentuk karakter masyarakat, yang berarti menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan, maka metode pemberdayaan masyarakat menjadi penting untuk dikaji. Tujuannya adalah: *Pertama*, agar sabyek (fasilitator) pemberdayaan masyarakat dapat menggunakan salah satu metode yang efektif dan efisien sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. *Kedua*, menambah wawasan subyek (fasilitator) tentang beberapa metode pemberdayaan masyarakat, sehingga antara fasilitator dengan masyarakat tidak pasif.⁷⁶

74 Slamet Muhaimin Abda, *PrinsipPrinsip Metodologi Dakwah*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), cet.ke-1, h. 79

75 A. Surjadi, *Dakwah Islam dengan Pembangunan Masyarakat Desa (Peranan Pesantren dalam Pembangunan)*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), cet.ke-4, h 86-137

76 Nasruddin Harahap dkk., *Dakwah Pembangunan*, (Yogyakarta: DPD Golkar Tk.I, 1992), cet.ke-1, h. 191

Faisal Ismail dalam Nasruddin Harahap dkk., berpendapat bahwa pola atau model dakwah yang sesuai dikembangkan dalam pembangunan adalah model dakwah *bil-hal*. Karena, pembangunan dalam hal ini pemberdayaan menuntut kerja dan karya nyata, menuntut keterlibatan yang intens dari pelaku pemberdayaan terhadap permasalahan masyarakat sebagai penerima manfaat dan merumuskan permasalahan tersebut kedalam bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan, dan manfaat kegiatan pemberdayaan dapat secara langsung dirasakan masyarakat.⁷⁷

Menurut Thohari Musnawar, ada 4 metode pemberdayaan masyarakat dalam pendekatan dakwah *bih-hal*,⁷⁸ yakni: *Pertama*, metode pemanasan dan tindak lanjut. Merubah suatu masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi memerlukan keseriusan dan tahapan-tahapan. Sehingga, program yang disampaikan tidak terkesan mendadak dan mengakibatkan ketidaksiapan masyarakat dalam menerima dan melaksanakan program pembangunan, dan pada akhirnya hasil yang dicapai tidak maksimal. Sebagai ilustrasi, masyarakat agraris tidak mungkin langsung menggunakan teknologi modern yang canggih, tetapi diperlukan tahapan pengenalan melalui teknologi terapan dan training. Konsep tersebut dianggap sebagai perkembangan aliran pemikiran tentang pembangunan desa, yaitu aliran atau kelompok reformis. Aliran ini menyebutkan, bahwa pembangunan masyarakat desa dengan cara meningkatkan fungsi kelembagaan dan system sosial yang ada tanpa menggantikannya. Mereka berasumsi, bahwa keterbelakangan dalam segala hal disebabkan oleh kesalahan berfungsinya

⁷⁷ *Ibid.*, h. 187

⁷⁸ *Ibid.*, h.192-196

sistem kemasyarakatan yang ada yang menyebabkan sosio genetik keterbelakangan masyarakat.⁷⁹

Esensi teori aliran reformis di atas telah disepakati dalam konferensi kependudukan dan pembangunan tahun 1994 di Cairo yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan pembangunan harus dipertimbangkan aspek sosial budaya, agama, dan etika yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. Pola pembangunan dengan pendekatan *top down* sering menyebabkan benturan dengan institusi dan mekanisme sosial budaya lokal. Keunggulan teori ini adalah pembangunan dengan cara menerapkan hal yang baru tanpa mempertimbangkan institusi dan sosial budaya yang sudah ada ketinggalan satu langkah dalam pemanfaatannya.⁸⁰ Kedua, metode demonstrasi. Metode demonstrasi yang dimaksud dalam hal ini adalah memperlihatkan bukti kebenaran, kebaikan, dan keberhasilan program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh dunia Islam dalam perspektif sejarah. Misalnya, betapa Islam telah mengalami kemajuan yang luar biasa dalam bidang ekonomi. Pada masa kejayaan Islam di Madinah, Rasulullah telah membangun ekonomi masyarakat dengan membentuk *Baitul mall* sebagai lembaga ekonomi umat, yang berfungsi mengelola dan memberdayakan berbagai bentuk harta dengan cara halal. Hal ini bukan tanpa proses, tetapi memang membayar pajak dan upeti kepada pemerintah (suku) sudah menjadi tradisi. Sehingga, ketika gagasan tentang *baitul mall* dengan pengelolaan yang lebih manusia dan berkeadilan mendapat tanggapan yang positif dari umat Islam. Ketiga, metode masyarakat bersuasana dakwah. Salah satu metode yang sangat efektif dalam dakwah

79 M. Munandar Soelaiman, *Dinamika Masyarakat Transisi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) cet. ke1, h. 154

80 *Ibid.*, h. 163-164

pembangunan adalah apabila terkondisikan suatu masyarakat menjadi masyarakat yang bersuasana dakwah, yaitu masyarakat yang masing-masing individu didalamnya menjadi pribadi yang mampu membangun dirinya dan sekaligus merasa bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam membangun masyarakat dan bangsanya. Masyarakat yang terbuka, mau mengingatkan dan mau diingatkan (QS. Ali Imran: 104, al-Asr: 1-3). Keempat, pemecahan inti masalah. Metode yang terakhir ini adalah metode yang harus melalui proses yang panjang, karena sang da'i pembangunan harus merubah suatu pribadi atau masyarakat dari keterpurukan menjadi lebih baik dan mapan.

Dengan demikian, untuk merubah suatu masyarakat harus terlebih dahulu melalui tiga metode sebelumnya. Misalnya, untuk merubah masyarakat yang terjangkit penyakit malas, kita tidak bisa langsung menyediakan lahan pekerjaan secara seponan, tetapi lebih baik didahului dengan penyadaran akan pentingnya usaha sendiri dibandingkan menanti keajaiban, kemudian membandingkan pekerjaannya dengan orang yang lebih maju dan berhasil, jadikan ia sebagai juru bicara dalam kelompok dan bertanggung jawab atas pembicaraannya. Keempat, metode tersebut harus didukung oleh teknologi modern sesuai dengan kemajuan dan tuntutan zaman.

Dengan meminjam teori tentang metode pembangunan masyarakat desa, A. Surjadi membagi metode pemberdayaan masyarakat menjadi 12 (dua belas metode), yakni; *direct contact* (kontak langsung), *demonstration of the results* (demonstrasi hasil), *demonstration of the process* (demonstrasi proses), bekerja dengan para

pemimpin desa; *action group*, alat peraga; bacaan; karyawisata, kesenian, pameran, pusat penerangan, dan *sosial pressure* (paksaan sosial).⁸¹

a. Kontak Langsung (*Direct Contact*)

Sejak perintah dakwah diamanatkan oleh Allah SWT. kepada Nabiullah Muhammad SAW., hingga sekarang metode dakwah yang paling sering digunakan adalah metode kontak langsung atau berhubungan langsung antara da'i dengan masyarakat sebagai subyek dan obyek pemberdayaan melalui pendekatan *fardiyah* (*individu*) dan pendekatan *'ammah* (kelompok). Pendekatan fardiyah dalam metode kontak langsung diyakini efektif dalam membina dan membentuk kader-kader pemberdayaan sebagaimana telah dicontohkan Rosulullah SAW.⁸²

Dakwah *fardiyah* bertujuan untuk mengenal masyarakat secara lebih dekat (QS. Hud:61). Fasilitator pemberdayaan secara bersama-sama masyarakat dan membina ukhuwah ilallah, sehingga terjalin komitmen sebagai upaya melakukan perubahan, baik perubahan individu maupun komunitas atas dasar Islam. Metode *direct contact* (kontak langsung) bertujuan: untuk menemukan orang-orang yang dapat dipercaya untuk menjadi pemimpin, untuk menjelaskan rencana pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah, untuk mengetahui dan memetakan keinginan masyarakat, dan belajar bersama-sama

⁸¹ Surjadi, *Op. Cit.*, h. 86-137

⁸² Husin bin Muhammad bin Ali Jabir, *Ath-thariq Ila jama'ah Muslimin*; terj oleh Aunurrafi Shaleh Tahmid dengan judul " *Menuju Jam'atul Muslimin*, (Jakarta: Robbani Press, 1996), cet.ke-1, h. 146

masyarakat menemukan permasalahan, motivasi, dan kemampuan mereka dalam mengatasi masalah tersebut.⁸³

Metode *direct contact* (kontak langsung), juga dapat menggunakan pendekatan *'ammah* (kelompok). Tujuannya adalah untuk membangun ukhuwah kelompok-kelompok-kelompok masyarakat, sehingga terjalin hubungan yang lebih erat dan spesifik. Beberapa teknik yang efektif dalam metode *direct contact*:

- 1) Membangun suasana yang menyenangkan dalam proses diskusi dan berinteraksi.
- 2) Berupaya menjadi pendengar yang baik untuk menjangar berbagai persolan.
- 3) Meyakini berbagai data dan fakta yang dihimpun.
- 4) Yakinkan bahwa ide-ide baru yang muncul merupakan kemampuan dan kreatifitas mereka.
- 5) Menggunakan bahasa yang mudah difahami dan hindari percakapan yang kontradiktif.
- 6) Berupaya menciptakan sikap kesetiakawanan, sehingga mendorong masyarakat ingin selalu bertemu, mengungkapkan berbagai keluhan dan berdiskusi.⁸⁴

b. Demonstrasi Hasil

Tugas dan peranan fasilitator pemberdayaan masyarakat adalah merubah cara fikir dan kerja kepada yang lebih maju dan berhasil guna. Misalnya, untuk meningkatkan produksi pengolahan singkong, para pengusaha UMKM mengolah

⁸³ Surjadi, *Op. Cit.*, hal. 87

⁸⁴ Nani Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *op., cit.*, h. 99

keripik singkong dengan menggunakan alat cara tradisional yang sangat sederhana berubah dengan menggunakan alat serut yang lebih modern dan menggunakan kemasan yang lebih menarik. Perubahan pengelolaan pertanian dengan menggunakan bahan-bahan anorganik kepada bahan-bahan organik akan lebih menguntungkan dalam hal kualitas produksi dan kualitas kesehatan.⁸⁵

c. Demonstrasi proses

Metode demonstrasi proses merupakan proses pembelajaran. Belajar mengelola lingkungan, sehingga memungkinkan seseorang melakukan atau mempetunjukkan tingkah laku yang disebabkan perubahan kebiasaan, kecakapan, daya fikir dan bukan karena perubahan fisik.⁸⁶ Demonstrasi adalah memperkenalkan *thariqoh* (metode) baru kepada masyarakat. Mendemonstrasikan bahwa cara kerja media atau alat baru lebih menguntungkan dibandingkan dengan cara kerja lama atau sebaliknya, cara kerja lama lebih efisien dan efektif dibandingkan cara kerja baru. Oleh karena itu, cara kerja yang didemonstrasikan boleh jadi bersumber dari cara kerja masyarakat lokal.⁸⁷ Misalnya, metode menanam padi dengan cara tradisional yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu boleh jadi lebih baik dibandingkan dengan metode baru. Penggunaan bahan-bahan organik merupakan metode lama yang dikembalikan, karena dari sisi kesehatan dan kelangsungan lingkungan lebih terjamin.

⁸⁵ Fariza Makmun, Tesis dengan Judul "*Fungsi Yayasan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (YLPMD)*", Lampung: PPs IAIN Raden Intan, 2007), h. 95

⁸⁶ Sutomo, *Pembelajaran Menyenangkan Untuk anak-anak Autis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h.120

⁸⁷ Nanih Machendrawaty dan Imam Safei, *Op. Cit.*, h. 101

Beberapa hal yang perlu dilakukan ketika da'i pembangunan atau fasilitator menggunakan metode demonstrasi proses ditengah-tengah masyarakat:

- 1) Metode ini efektif apabila masyarakat melihat, mendengar, mengerti, dan mengerjakannya. Untuk itu, diusahakan sebanyak mungkin masyarakat yang hadir.
- 2) Jelaskan mengapa metode ini yang digunakan.
- 3) Tunjukkan bagaimana mengerjakannya.
- 4) usahakan agar masyarakat mampu mengikuti setiap langkah yang demonstrasikan.
- 5) Berikan waktu dan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya.
- 6) Da'i pembangunan harus memiliki keterampilan dalam mendemonstrasikan jenis apapun sesuai dengan program.⁸⁸

Oleh karena itu, kemahiran fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam mendemonstrasikan tahapan-tahapan penggunaan suatu metode menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan masyarakat.

d. Bekerja dengan Pemimpin-pemimpin Desa

Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata orang-orang yang ada disekelilingnya. Dia memiliki kelebihan dalam kecerdasan, mempunyai kelebihan dalam bersosialisasi dan berinteraksi, mempunyai pandangan jauh kedepan,

memiliki kesabaran dan ketekunan, memiliki kelebihan dalam berkomunikasi dan berinisiasi, dan sifat-sifat unggul lainnya.⁸⁹

Jika merujuk pada beberapa keunggulan para pemimpin masyarakat tersebut di atas, mereka yang dikategorikan sebagai pemimpin bukan hanya pemimpin-pemimpin masyarakat yang ditunjuk secara resmi, melainkan bagian-bagian masyarakat yang memiliki karakter seorang pemimpin. Frans Wiryanto Jomo, membagi pemimpin menjadi tiga, yaitu; pemimpin solidaritas, pemimpin resmi, dan pemimpin konsultatif.⁹⁰

Pemimpi solidaritas adalah pemimpin kelompok-kelompok masyarakat yang tidak ditunjuk secara resmi baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Boleh jadi mereka dianggap pemimpin karena kemampuan mereka dalam mengorganisir berbagai kelompok yang ada pada masyarakat. Pemimpin resmi adalah pemimpin-pemimpin masyarakat yang ditunjuk secara resmi oleh masyarakat atau oleh pemerintah, misalnya, kepala desa, lurah, dan sekretaris desa. Sedangkan yang dimaksud dengan pemimpin konsultatif adalah mereka-mereka yang memiliki kemampuan dalam hal-hal tertentu, sehingga mereka dijadikan masyarakat untuk berkonsultasi dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

Dengan pemahaman bahwa, kepemimpinan merupakan keniscayaan dalam kelompok, karena mereka mempunyai kemampuan untuk mengorganisir kelompok atau orang-orang yang ada disekelilingnya, maka da'i pembangunan mempunyai kewajiban untuk bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin masyarakat. Da'i pembangunan

⁸⁹ Arifin, *Psikologi Dakwah Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), cet.ke-2, ha. 92-93

⁹⁰ Frans Wiryanto Jomo, *Membangun Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1986), cet.ke-2, h. 111-112

berperan memberdayakan kelebihan dan kemampuan pemimpin masyarakat untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan dirinya dan masyarakat. Hal inilah yang diisyaratkan oleh Allah SWT dalam surat *Al-Maidah ayat 2*, yang artinya: “bertolong-tolonglah dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah bekerja sama di dalam berbuat dosa dan permusuhan.

e. Aksi Kelompok

Tidak semua permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan fardiyah dan atau ‘ammah (Ali Imran: 104). Karena dakwah ‘ammah mempunyai kelebihan-kelebihan, diantaranya; dapat menghadapi mad’u dalam jumlah yang lebih banyak, biaya relative murah, waktu tidak terlalu lama, dan dapat memecahkan masalah yang rumit sekalipun. Karena, Mengembangkan masyarakat desa berarti membangkitkan keinginan, kemampuan dan kepercayaan pada diri sendiri, agar masyarakat mau terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. Juga, agar masyarakat bekerja secara metodis, efektif dan terorganisir. Menurut Frans Wiryanto Jomo, kegiatan yang tidak terorganisir dan dikerjakan secara individual menurut pola-pola yang lebih maju, tidak akan menyelesaikan masalah. Karena, inti dari kerja sama adalah kerja kolektif.⁹¹

Ada beberapa keuntungan apabila da’i pembangunan atau fasilitator menggunakan metode aksi kelompok, diantaranya:

Pertama, melalui kontak langsung, fasilitator pemberdayaan akan menemukan sejumlah orang yang menyatakan minatnya terhadap suatu masalah. Kedua, orang-

⁹¹ Kelompok kerja sering disebut kelompok proyek, kelompok pelayanan masyarakat, usaha bersama yang metodis. *Ibid.*, h. 33

orang yang berminat tadi akan mengundang kelompok masyarakat yang lain untuk mendiskusikan sesuatu hal yang dihadapi masyarakat secara informal. Ketiga, cepat atau lambat, bila diskusi dilakukan secara terus menerus dengan desain dan target yang jelas, maka beberapa orang diantara kelompok akan memotivasi masyarakat lain untuk ikut memecahkan masalah-masalah yang dihadapi secara bersama-sama.⁹²

Untuk mencapai hasil diskusi yang baik, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh da.i pembangunan, yaitu: Pertama, melalui diskusi-diskusi, kelompok dapat mengenal problem-problem yang dihadapi masyarakat, dan tumbuh keinginan untuk ikut serta memecahkannya serta tumbuh tanggung jawab untuk ikut serta mencari jalan penyelesaiannya. Kedua, meminta saran para teknisi (pemimpin konsultatif) untuk mengetahui alternative-alternatif pemecahan masalah. Ketiga, memilih alternative yang menurut kelompok dianggap paling efektif sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Keempat, capailah keputusan untuk melakukan aksi selanjutnya. Kelima, rencanakan aksi pertama yang akan dilaksanakan oleh kelompok. Keenam, mulailah pekerjaan, dan jangan sampai menundanya.⁹³

f. Menggunakan Media pemberdayaan masyarakat.

Setiap fasilitator pemberdayaan masyarakat diharapkan menguasai alat-alat bantu yang dimaksud di atas, karena alat bantu akan mempermudah fasilitator dalam menyampaikan materi pemberdayaan. Ada diantara masyarakat yang sulit menerima materi dengan menggunakan metode lisan, sehingga diperlukan alat peraga untuk membantu mereka memahami materi yang disampaikan. Ada diantara masyarakat

⁹² Nani Machendrawaty dan Imam Safei, *Op. Cit.*, h. 102

⁹³ *Ibid.*,

yang gemar membaca, tetapi media membaca tidak tersedia sehingga da'i pembangunan memerlukan bahan bacaan, seperti bulletin, majalah, koran, poster dan lain sebagainya. Bahkan ada diantara masyarakat yang lebih tertarik dengan gambar-gambar dibandingkan dengan mendengarkan diskusi, ceramah, dan membaca.

Media pemberdayaan masyarakat dalam perspektif dakwah dari segi sifatnya dibagi menjadi dua golongan, yaitu: 1) Media tradisional, yaitu berbagai seni pertunjukan tradisional yang bersifat komunikatif sebagai media hiburan, seperti ludruk, wayang, drama, dan sebagainya; 2) Media modern, seperti, televisi, radio, pers dan sebagainya.⁹⁴

Penggunaan media dalam pemberdayaan masyarakat didasarkan pada Tesis sebagai tugas akhir S2 penulis, bahwa KSM-KSM binaan YLPMD Metro Lampung, keberhasilan mereka membina masyarakat petani dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian melalui program pengolahan lahan dengan pupuk organik dilakukan dengan menggunakan metode demonstrasi hasil, aksi kelompok, dan menggunakan media baik media cetak maupun media alat. Media cetak yang digunakan, seperti majalah, bulletin, Koran yang khusus membahas tentang petani organik. Sedangkan media alat yang digunakan adalah papan tulis, pengeras suara, alat peraga dan lain sebagainya.⁹⁵

g. Karyawisata (*tours*)

Akhir-akhir ini, metode karyawisata banyak digunakan umat Islam dalam berdakwah. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT, diantaranya:

⁹⁴Muhammad Ali Aziz, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 149

⁹⁵ Fariza Makmun, *op. cit.*, h. 95

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِآبَآؤُنَا أَنِنَّا لَمُخْرَجُونَ ۖ ٦٧

Artinya: “Katakanlah: "Berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa (QS. An-Naml (27) :69).

فَلَنَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ٦٩

Artinya: “Maka Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? karena Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada. (QS. Al-Hajj (22) : 46)

Ayat diatas menjelaskan, bahwa Allah SWT telah menciptakan ayat-ayatnya yang tersirat di jagat raya ini dan berbagai kejadian-kejadian akibat ulah manusia, baik yang buruk maupun yang baik merupakan media pembelajaran (*tarbiyah*) bagi umat manusia yang mempunyai keinginan untuk mengambil pelajaran darinya. Menurut Surjadi, tujuan metode karyawisata adalah:

- 1) Melihat hasil demonstrasi hasil atau proses orang lain.
- 2) Melihat cara kerja alat-alat baru.
- 3) Melihat usaha-usaha pembangunan di tempat-tempat lain.⁹⁶

Untuk menghindari agar karyawisata tidak menjadi mubazir, maka karyawisata hendaknya direncanakan dengan baik, baik tempat maupun tujuan yang hendak dicapai. Juga, perlu aksi tidak lanjut setelah kelompok masyarakat kembali dari karyawisata.

Apabila tidak, maka karyawisata akan menjadi media hiburan yang menghamburkan dana belaka.

Terdapat banyak metode yang bisa dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Selain metode diatas ada beberapa metode pemberdayaan masyarakat⁹⁷ seperti

1. FGD (*Focus Group Discussion*) atau Diskusi Kelompok yang Terarah

Sebagai suatu metoda pengumpulan data, FGD merupakan interaksi individu-individu (sekitar 10-30 orang) yang tidak saling mengenal dan oleh seorang pemandu (moderator) diarahkan untuk mendiskusikan pemahaman dan atau pengalamannya tentang sesuatu program atau kegiatan yang diikuti dan atau dicermatinya.

Sebagai suatu metoda pengumpulan data, FGD dirancang dalam beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Perumusan kejelasan tujuan FGD, utamanya tentang isu-isu pokok yang akan dipercakapkan, sesuai dengan tujuan kegiatannya.
- 2) Persiapan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan
- 3) Identifikasi dan pemilihan partisipan, yang terdiri dari para pemangku kepentingan kegiatan terkait, dan atau narasumber yang berkompeten.
- 4) Persiapan ruangan diskusi, termasuk tata-suara, tata-letak, dan perlengkapan diskusi (komputer dan LCD, papan-tulis, peta-singkap, kertas-plano, kertas meta-plan, spidol berwarna, dll)
- 5) Pelaksanaan diskusi
- 6) Analisis data (hasil diskusi)

7) Penulisan laporan, termasuk lampiran tentang transkrip diskusi, rekaman suara, foto, dll.

2. PLA (*Participatory Learning and Action*), atau Proses Belajar dan Praktek Secara Partisipatif

PLA merupakan bentuk baru dari metoda pemberdayaan masyarakat yang dahulu dikenal sebagai “*learning by doing*” atau belajar sambil bekerja. Secara singkat, PLA merupakan metoda pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar tentang suatu topik, seperti pesemaian, pengolahan lahan, perlindungan hama tanaman, dll. Yang segera setelah itu diikuti aksi atau kegiatan riil yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut. Melalui kegiatan PLA, akan diperoleh beragam manfaat, berupa:

- 1) Segala sesuatu yang tidak mungkin dapat dijawab oleh “orang luar”
- 2) Masyarakat setempat akan memperoleh banyak pengetahuan yang berbasis pada pengalaman yang dibentuk dari lingkungan kehidupan mereka yang sangat kompleks
- 3) Masyarakat akan melihat bahwa masyarakat setempat lebih mampu untuk mengemukakan masalah dan solusi yang tepat dibanding orang luar
- 4) Melalui PLA, orang luar dapat memainkan peran penghubung antara masyarakat setempat dengan lembaga lain yang diperlukan. Disamping itu, mereka dapat menawarkan keahlian tanpa harus memaksakan kehendaknya.

Terkait dengan hal itu, sebagai metoda belajar partisipatif, PLA memiliki beberapa prinsip sebagai berikut:

- 1) merupakan proses belajar secara berkelompok yang dilakukan oleh semua stakeholders secara interaktif dalam suatu proses analisis bersama
- 2) Multi perspective, yang mencerminkan beragam interpretasi pemecahan masalah yang riil yang dilakukan oleh para pihak yang beragam dan berbeda cara pandangnya
- 3) Spesifik lokasi, sesuai dengan kondisi para pihak yang terlibat
- 4) Difasilitasi oleh ahli dan stakeholders (bukan anggota kelompok belajar) yang bertindak sebagai katalisator dan fasilitator dalam pengambil keputusan; dan (jika diperlukan) mereka akan meneruskannya kepada pengambil keputusan
- 5) Pemimpin perubahan, dalam arti bahwa keputusan yang diambil melalui PLA akan dijadikan acuan bagi perubahan-perubahan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat setempat.

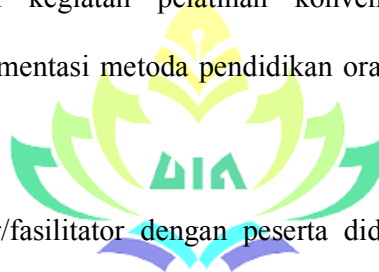
3. SL atau Sekolah Lapang (*Farmers Field School*)

Sebagai metoda pemberdayaan masyarakat, SL/FFs merupakan kegiatan pertemuan berkala yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat pada hamparan tertentu, yang diawali dengan membahas masalah yang sedang dihadapi, kemudian diikuti dengan curah pendapat, berbagi pengalaman (*sharing*), tentang alternatif dan pemilihan cara-cara pemecahan masalah yang paling efektif dan efisien sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki.

4. Pelatihan Partisipatif

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat harus diawali dengan “*scoping*” atau penelusuran tentang program pendidikan yang diperlukan dan analisis kebutuhan atau “*need assesment*”. Untuk kemudian berdasarkan analisis kebutuhannya, disusunlah program atau acara pemberdayaan masyarakat yang dalam pendidikan formal (sekolah) disebut dengan silabus dan kurikulum, dan perumusan modul/lembar persiapan fasilitator pada setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Berbeda dengan kegiatan pelatihan konvensional, pelatihan partisipatif dirancang sebagai implementasi metoda pendidikan orang dewasa (POD), dengan ciri utama:



- 1) Hubungan instruktur/fasilitator dengan peserta didik tidak lagi bersifat vertikal tetapi bersifat lateral/horizontal
- 2) Lebih mengutamakan proses daripada hasil, dalam arti, keberhasilan pelatihan tidak diukur dari seberapa banyak terjadi alih-pengetahuan, tetapi seberapa jauh terjadi interaksi atau diskusi dan berbagi pengalaman (*sharing*) antara sesama peserta maupun antara fasilitator dan pesertanya.

5. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Islam

Lippit merinci tahapan kegiatan pemberdayaan dalam 7 kegiatan pokok:98

- a. Penyadaran, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang “keberadaannya”, baik keberadaannya sebagai individu dan

anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya, ekonomi dan politik. Proses penyadaran seperti inilah yang dimaksud oleh Freire⁹⁹ sebagai tugas utama dari setiap kegiatan pendidikan, termasuk didalamnya penyuluhan.

- b. Menunjukkan adanya masalah, yaitu kondisi yang tidak diinginkan yang kaitannya dengan: keadaan sumber daya (alam, manusia, sarana-prasarana, kelembagaan, budaya, dan aksesibilitas), lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya dan politik. Termasuk dalam upaya menunjukkan masalah tersebut, adalah factor-faktor penyebab terjadinya masalah, terutama yang menyangkut kelemahan internal dan ancaman eksternalnya.
- c. Membantu pemecahan masalah, sejak analisis akar masalah, analisis alternative pemecahan terbaik yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi internal (kekuatan/kelemahan) maupun kondisi eksternal (peluang dan ancaman) yang dihadapi.
- d. Menunjukkan pentingnya perubahan, yang sedang dan akan terjadi dilingkungannya, baik lingkungan organisasi dan masyarakat (local, nasional, regional dan global). Karena kondisi lingkungan (internal dan eksternal) terus mengalami perubahan yang semakin cepat, maka masyarakat juga harus disiapkan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut melalui kegiatan “perubahan yang terencana”.

⁹⁹ P. Freire, *Extension or Communicating in Education for Critical Consciousness*, (New York: Seaberg Press, t.th), h. 95

- e. Melakukan pengujian dan demonstrasi, sebagai bagian dan implementasi perubahan terencana yang berhasil dirumuskan. Kegiatan uji-coba dan demonstrasi ini sangat diperlukan, karena tidak semua inovasi selalu cocok secara teknis, ekonomis, sosial-budaya, politik/kebijakan) dengan kondisi masyarakatnya. Di samping itu, uji-coba juga diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang beragam alternatif yang paling “bermanfaat” dengan resiko atau korbanan yang terkecil.
- f. Memproduksi dan publikasi informasi, baik yang berasal dari “luar” (penelitian, kebijakan, produsen/pelaku bisnis, dll) maupun yang berasal dari dalam (pengalaman, indigenous, teknologi, maupun kearifan tradisional dan nilai-nilai adat yang lain), Sesuai perkembangan teknologi, produk dan media publikasi yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik (calon) penerima manfaat penyuluhannya.
- g. Melaksanakan pemberdayaan/penguatan kapasitas, yaitu pemberian kesempatan kepada kelompok lapisan bawah (*grassroots*) untuk bersuara dan menentukan sendiri pilihan-pilihannya (*voice and choice*) kaitannya dengan aksesibilitas informasi, keterlibatan dalam pemenuhan kebutuhan serta partisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan, bertanggung gugat (*akuntabilitas public*) dan penguatan kapasitas lokal.

Menurut Totok Mardikanto, tahap pemberdayaan masyarakat terdiri dari tahap penyadaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.¹⁰⁰ Pada tahap penyadaran, Islam mengajarkan kepada umat manusia bahwa, agar setiap manusia memiliki etos (semangat) dalam mencapai rezki dari Allah SWT (QS. Al

100 Totok Mardikanto, *op., cit.*, h. 119-120

Jumu'ah (62): 10). Dan semangat tidak putus asa, karena dibalik kesulitan ada kemudahan (QS. Al Insyirah (94): 5-7). Kedua, pengorganisasian masyarakat. Kerja yang efektif adalah kerja yang sistematis dan terorganisir dengan baik (QS. Ali Imran (3): 104) sehingga perubahan dapat terwujud. Ketiga, pelaksanaan pemberdayaan, yakni tahap pelaksanaan program yang didasari oleh kesadaran melalui media kerja terorganisir.

Amrullah Ahmad dalam Nanih Machendrawati menjelaskan, tahapan pemberdayaan masyarakat dalam Islam ada 3 (tiga) tahap, yakni tahap *takwin* (pembinaan, *tandhim* (pengorganisasian), dan tahap *taudi'* (pelepasan/kemandirian).

101

Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut :102



a. Perbaikan pendidikan (*Better education*)

Dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada: perbaikan materi, perbaikan metoda, perbaikan menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat; tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.

b. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*)

Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber

101 Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, , *op., cit.*, h. 32-35

102 Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat, Dalam Perspektif Kebijakan Politik*, Penerbit Alfabeta, Bandung, cet. III, 2015, h. 111-112

informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.

c. Perbaikan tindakan (*better action*)

Dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.

d. Perbaikan Kelembagaan (*better institution*)

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha.

e. Perbaikan Usaha (*better business*)

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan dan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

f. Perbaikan pendapatan (*better income*)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya; termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

g. Perbaikan lingkungan (*better environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan sering disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

h. Perbaikan kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapat dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

i. Perbaiki masyarakat (*better community*)

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

6. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Islam

Pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mencapai kemandirian masyarakat memerlukan kondisi atau aturan umum yang digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku yang dikenal dengan istilah prinsip. Sehingga, aktivitas menjadikan masyarakat mandiri tetap berlangsung sesuai dengan aturan-aturan (prinsip-prinsip) yang telah digariskan secara konseptual.

Tiga prinsip pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat menurut Zubaedi ada tiga, yakni: Pertama, prinsip keberlanjutan. Proses pemberdayaan masyarakat harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga dapat mengembangkan struktur organisasi dan bisnis yang dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan berbagai situasi dan kondisi, sehingga terbentuk masyarakat yang berdaya, masyarakat yang kuat, dinamis, dan harmonis. Kedua, prinsip kemandirian. *Rosources*, baik sumber daya alam maupun sumber daya finansial diupayakan pemanfaatannya oleh sumber daya manusia (masyarakat) setempat. Masyarakat diberi kemampuan untuk mengidentifikasi, memilih, dan memanfaatkan sumberdaya yang mereka sendiri. Ketiga, prinsip partisipasi. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan akan

menciptakan kebersamaan, persamaan, dan tanggung jawab terhadap rencana dan tujuan yang mereka inginkan.¹⁰³

Dalam Islam, Rosulullah SAW melaksanakan misi kenabian sebagai rahmatan *lil alamîn*, berupaya menjadikan masyarakat yang mandiri sesuai dengan potensi yang telah dikaruniakan Allah SWT kepada setiap hambanya. Rosulullah SAW dan para pengikut beliau memberdayakan masyarakat di atas prinsip-prinsip pemberdayaan yang bersumber dari al- Qur'an. Ulfi Putra Sany, mengidentifikasi prinsip pemberdayaan masyarakat dalam al-Qur'an menjadi tiga prinsip pemberdayaan masyarakat, yakni: pertama adalah prinsip *ukhuwwah*. Islam mendorong umatnya untuk saling membantu satu sama lain, dalam kerangka *ukhuwwah Islamiyah* dan *ukhuwah insaniyyah*. Kedua, prinsip *ta'awun*. Prinsip ini menegaskan bahwa, program pemberdayaan adalah tanggung jawab bersama, dan harus berlandaskan sinergi yang efektif antara pemangku kebijakan, praktisi dan penggiat sosial, dan masyarakat luas. Ketiga, prinsip persamaan derajat, di mana Islam menekankan kesamaan derajat antara umat manusia.¹⁰⁴

Sementara itu, pemberdayaan dalam suatu proses memerlukan kemampuan komunikasi, sehingga program pemberdayaan masyarakat mampu difahami, disebarluaskan kepada masyarakat yang lain, dan kemudian diimplementasikan secara kolektif. Beberapa prinsip komunikasi yang penting dalam pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

¹⁰³Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktik*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 90

¹⁰⁴ Ulfi Putra Sany, Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Qur'an, Jurnal Ilmu Dakwah Volume 39 No 1 (2019) 32-44, h. 41, <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/dakwah/article/view/3989/217>, diakses pada, 23 Februari 2020

Pertama, prinsip *qoulan ma'rūfan*. Sebagaimana termaktub dalam Al-qur'an surat An-Nisa, (4) : 5 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا
٤

Artinya :“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (QS. An-Nisa (4) : 5)

Qoulan Ma'rūfan adalah kata-kata yang baik atau perkataan yang dikenal dan dipahami oleh obyek pemberdayaan. Oleh karena itu, seorang fasilitator atau juga dikenal dengan istilah pendamping seyogyanya mengetahui kultur dan pola komunikasi masyarakat lokal untuk mempermudah sosialisasi dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Kedua, prinsip *qoulan sadīdan*. Sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an al-Ahdzab, (33): 70 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۗ

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.” (QS. Al-Ahdzab (33) : 70)

Qoulan Sadīdan adalah perkataa yang tepat atau benar. Tepat dan benar berkenaan dengan pemilihan kata-kata atau kalimat sesuai kemampuan obyek

pemberdayaan dan tepat atau benar sesuai dengan waktu atau momentum penyampaiannya.

Ketiga, prinsip *qoulan karîman*. Sebagaimana termaktub dalam Surat Al-Isra' ayat 23 yang berbunyi :

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ ۲۳﴾

Artinya :“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”. (Al-Isra, (17):23)

Qoulan karîman adalah perkataan yang membuat orang yang menerima pesan menjadi senang, lega, dan bahagia..

Keempat, prinsip *qoulan al-layyînan*, sebagaimana termaktub dalam surat Thaha ayat 44, berbunyi :

﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۚ ۴۴﴾

Artinya : Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang

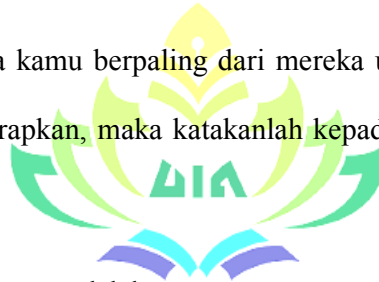
lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. (QS. Thaha (20) : 44)

Qoulan al-layyīnan adalah tuntunan sopan-santun dalam mengungkapkan atau menyampaikan pesan perubahan kepada orang lain, sehingga mempermudah fasilitator atau pendamping pemberdayaan masyarakat dalam melakukan perubahan.

Kelima, prinsip *Qoulan Maisûron* menjadi prinsip ke lima. Dalam surat al-Isra' ayat 28 berbunyi:

وَإِذَا تَعْرَضْنَا عَنْهُمْ أَتْبَغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۝ ٢٨

Artinya :Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. (Q.S Al-Isra'(17): 28).



Kata *qoulan maisûron* adalah ucapan yang pantas atau mudah. Perkataan dalam konteks ini adalah perkataan yang dapat memberi solusi atas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Keenam, prinsip *Qoulan Balîgon* adalah kata-kata yang mudah difahami, tidak berbelit-belit, dan langsung pada pokok permasalahan, sebagaimana termaktub dalam surat an-Nisa ayat 63 yang berbunyi :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي

أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ۝ ٦٣

Artinya :“Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. (QS. An-Nisa (4): 63)

7. Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal

Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Desa tertinggal sulit berkembang karena kebijakan pembangunan yang distorsif dan desa dimaksud berada pada posisi yang kurang menguntungkan, seperti; pendidikan dan skill yang rendah, minimnya modal usaha, secara geografis relative terisolir, dan jumlah penduduk relative jarang.¹⁰⁵ Desa tertinggal identik dengan kondisi desa yang miskin dan terbelakang.

Desa tertinggal merupakan wilayah yang tertinggal dalam ketersediaan sarana dan prasarana dasar sehingga perkembangan masyarakat dalam bidang ekonomi dan pendidikan terhambat.¹⁰⁶ Sedangkan menurut Bulkin, desa tertinggal adalah desa yang memiliki akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas, dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang minim.¹⁰⁷ Sebaliknya, masyarakat maju atau mandiri menurut Bulkin dkk., adalah desa yang memiliki akses terhadap

¹⁰⁵ Almasdi Syahza dan Suarman, Model Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan, *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* – Volume 18, Nomor 3, September 2014, h. 370, <https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas>, diakses, pada 5 Februari 2020

¹⁰⁶ Mubyarto dkk., *Ekonomi Rakyat Indonesia*, (Bogor. Sains: Yayasan Sajogyo Inti Utama, 1994), h. 24.

¹⁰⁷ Imron Bulkin dkk., *Indeks Pembangunan Desa 2014*, (Jakarta: Kementerian PPN/BAPPENAS, 2015), h. 30

pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas, dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bagus.¹⁰⁸

Masyarakat yang tertinggal menyebabkan masyarakat menjadi miskin. Para ilmuwan sosial membagi dua jenis penyebab kemiskinan, yakni: 1) Bahwa sikap individu yang tidak produktif mengakibatkan lahirnya kemiskinan; 2) Kemiskinan terjadi karena struktur sosial; keadaan masyarakat dan tatanannya yang tidak benar melahirkan kemiskinan. Dalam hal ini keadaan masyarakat yang miskin menjadikan individu-individu anggota masyarakatnya tidak produktif.¹⁰⁹

Penjelasan diatas cukup membantu dalam melihat penjelasan Al-Qur'an tentang faktor penyebab kemiskinan. Dari faktor yang pertama yaitu sikap individu dapat dikelompokkan lagi menjadi beberapa sebab, antara lain :

1. Faktor teologis, sikap keagamaan seseorang diduga dapat menjadi faktor penyebab kemiskinan, meskipun oleh yang bersangkutan itu dirasakan sebagai sesuatu yang memang secure (nyaman-nyaman saja). Di antaranya adalah pemahaman yang keliru terhadap beberapa istilah agama; *zuhud*, *qana'ah*, *tawakal*, dan *syukur*, sehingga menjadikan seseorang bersikap tidak produktif.
2. Etos kerja yang rendah yang disebabkan kebiasaan hidup santai dan terbiasa menikmati tanpa bekerja keras.

¹⁰⁸ *Ibid.*,

¹⁰⁹ Michael Serraden, *Asset and the Poor; A New American Welfare Policy*, Terjemah Sirajuddin Abas et.al., *Aset Untuk Orang Miskin; Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), h. 47

Kemiskinan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan relative dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif dinyatakan dengan beberapa persen dari pendapatn nasional yang diterimakan oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibandingkan dengan proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan lain.¹¹⁰ Sedangkan kemiskinan absolut diartikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut dari satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti: sandang, pangan, pemukiman, kesehatan dan pendidikan.¹¹¹

Pemberdayaan masyarakat tertinggal, sesungguhnya akan selalu berkaitan atau sekurang-kurangnya mencakup tiga aspek :¹¹²

Pertama, berkaitan dengan upaya peningkatan posisi tawar (bargaining position) masyarakat tertinggal melawan kekakuan (rigidity) dan sifat eksploitatif dari struktur yang membelenggu mereka. Artinya, program pembangunan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan seyogyanya tidak hanya terjebak pada program-program yang sifatnya karitatif dan apalagi yang bersifat punitive, melainkan harus lebih mengedepankan program-program yang berorientasi pada proses pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan. Pemberdayaan, yang intinya bersifat *people centered*, *partisipatory*, *empowering*, dan *susutaintable*. Pemberdayaan, mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan. Dua hal yang menjadi

¹¹⁰ Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinana dan Strategi Penangannya*, (Malang, TRANS Publishing, Malang, 2013), h. 3

¹¹¹ *ibid*, h. 3

¹¹² *ibid*,. h. 234-236

prasyarat bagi upaya pemberdayaan adalah: Pertama, pembentukan kelompok (pokmas) untuk memperkuat posisi bargaining penduduk miskin, khususnya dalam penentuan harga. Kedua, dalam bentuk pengembangan jaringan (networking) dan memperluas akses penduduk miskin terhadap pasar yang lebih luas.

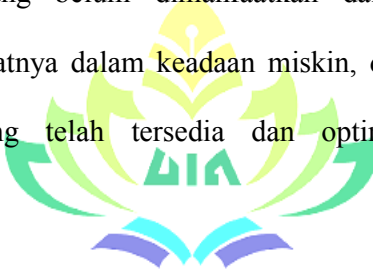
Kedua, berkaitan dengan upaya mengurangi kadar kerentanan dan sekaligus bagaimana memperkuat penyangga sosial-ekonomi keluarga tertinggal. Dalam hal ini, salah satu hal yang dapat dikembangkan adalah bagaimana mendorong pengembangan kegiatan produktif alternative keluarga miskin. Selama ini, kekurangan pokok yang perlu diperhatikan dari berbagai pengentasan masyarakat miskin yang banyak dipraktekkan adalah bahwa mereka menjadi begitu memusatkan perhatian pada peningkatan kuantitas produksi atau hasil kegiatan produktif masyarakat tertinggal yang lebih substansial.

Ketiga, berkaitan dengan upaya untuk memberikan perlindungan sosial bagi anak-anak miskin. Dalam upaya penanganan pekerja anak dan untuk lebih memastikan kelangsungan pendidikan anak-anak miskin, awal untuk program intervensi ada baiknya jika focus anak rawan yang hendak ditangan dikonsentrasikan khusus kepada siswa rawan DO di jenjang SD-SMP dan pekerja anak disektor berbahaya.

Dari perspektif wilayah, kawasan yang merupakan kantong-kantong kemiskinan dibedakan dalam dua golongan, yaitu kawasan tertinggal dan kawasan terbelakang 113 menurut Suetomo, kawasan tertinggal adalah wilayah yang secara bersama-sama

dikembangkan dengan wilayah lain, karena berbagai hal kawasan tersebut tidak berkembang sebagaimana diharapkan, sehingga secara sosial ekonomi keadaan masyarakat relatif rendah, karena terbatasnya potensi dan sumberdaya. Sementara itu, kawasan terbelakang adalah suatu wilayah atau kawasan yang mempunyai potensi dan sumberdaya, tetapi belum dikembangkan dan dikelola secara serius, sehingga kondisi sosial ekonomi mayoritas penduduknya dalam katagori rendah dan miskin.

Menurut Owens dan Saw dalam Soetomo, kawasan terbelakang yang memiliki potensi sumberdaya yang belum dimanfaatkan dan dikelola secara baik dan memposisikan masyarakatnya dalam keadaan miskin, diperlukan dua strategi, yakni: pendayaan potensi yang telah tersedia dan optimalisasi potensi yang telah dimanfaatkan.¹¹⁴



Berdasarkan konsep ketertinggalan dan keterbelakangan di atas, tampaknya pendapatan sebagai refresentasi dari kemiskinan merupakan standar pengukuran terhadap desa tertinggal dan terbelakang. Menurut Gordin dalam Isbandi menjelaskan, bahwa kebutuhan tidak selalu absolut, karena kebutuhan terdiri dari dua komponen yang saling berpengaruh, yakni kebutuhan prioritas dan kebutuhan relatif.¹¹⁵ Dalam memenuhi kebutuhan prioritas, pihak yang memiliki otoritas seringkali harus mengarahkan bila terjadi konflik antara merumuskan keinginan dengan memenuhi kebutuhan hidup. Karena, *community worker* atau fasilitator berperan memfasilitasi memenuhi kebutuhan hidup masyarakat untuk memenuhi keinginan masyarakat.

¹¹⁴ *Ibid.*,

¹¹⁵ Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasisi Aset Komunitas dari Pemikiran Menuju Penerapan*, (Jakarta, FISIP-UI Press, 2007), h. 325-327

Goodin berpandangan, bahwa kebutuhan bersifat relatif yang tergantung terhadap waktu, tempat, dan lingkungan sosial.¹¹⁶

Berdasarkan konsep kebutuhan tersebut, Bradshaw dalam Isbandi membagi kebutuhan menjadi empat kategori, yaitu: 1) kebutuhan normative, kebutuhan yang didasarkan pada pemahaman masyarakat yang disesuaikan dengan standar norma yang berlaku pada lingkungannya; 2) kebutuhan yang dipersepsikan atau dirasakan; 3) kebutuhan yang diekspresikan atau kebutuhan yang diungkapkan oleh masyarakat dengan mencari berbagai layanan dalam memenuhi; 4) kebutuhan relative, kebutuhan yang lebih fokus pada kesenjangan layanan pada wilayah yang berbeda. ¹¹⁷

Menurut Isbandi, untuk memenuhi kebutuhan tersebut telah mengembangkan enam asset berdasarkan pemikiran Green dan Hai Nes untuk menghadapi perubahan, yakni: 1) Modal fisik (*physical capital*), terdiri dari dua kelompok utama yaitu bangunan dan infrastruktur; 2) Modal finansial (*financial capital*): Modal lingkungan (*invironmental capital*), baik lingkungan yang belum maupun yang telah dikelola; 3) Modal teknologi (*technological capital*); 4) Modal manusia (*human capital*) berkualitas dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; 5) Modal sosial (*sosial capital*) berupa norma atau aturan yang bersifat mengikat berlandaskan *trust* dan *networking*.¹¹⁸

8. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan masyarakat

a. Faktor-Faktor Pendukung

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 325-327

¹¹⁷ *Ibid.*, h. 328-330

¹¹⁸ *Ibid.*, h. 285

Fasilitator atau tenaga pemberdayaan masyarakat sebagai *agent of change* berhadapan dengan masyarakat dengan berbagai problem, sehingga perlu menguasai faktor pendukung dan penghambat proses pemberdayaan masyarakat. Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dimaksud adalah partisipasi masyarakat, keterbukaan, system pendidikan yang maju, keinginan untuk maju, orientasi terhadap masa depan. 119

Masyarakat harus menjadi pelaku pemberdayaan, sehingga akan terjadi aktivitas yang berkelanjutan. Masyarakat yang berdaya akan terus berpartisipasi dan memperbaiki kemampuan, sehingga mencapai kesejahteraan atau kebutuhan yang mereka inginkan. Partisipasi adalah aktivitas, Eltizoni dalam Margaret M. Polama menjelaskan, partisipasi adalah aktivitas yang dilakukan berdasarkan kesadaran pribadi, komitmen, dan pengetahuan serta fasilitas kekuasaan dalam merubah tatanan sosial.¹²⁰ Sedangkan menurut Cohen dan Uphoff dalam Satria Mentari Tumbel, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan dibagi dalam dua tahap: (1) keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah penetapan rencana program. (2) keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan

119Media Internet, <http://prasetyowidi.wordpress.com/2010/01/03/faktor-pendukung-dan-penghambat-perubahan-sosial/> diakses pada 28112012

120Margaret M. Polama, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2003), h. 355

masyarakat Islam.¹²¹ Lingkup partisipasi masyarakat berupa: keterlibatan dalam kelompok kerja, diskusi kelompok, program kelompok, dan menikmati hasil.¹²²

Keterbukaan adalah memberikan ruang terhadap individu maupun kelompok untuk mengemukakan pendapat, bertukar pikiran, berdiskusi tentang berbagai hal, sehingga perubahan akan tercapai. Keterbatasan masyarakat tentang sesuatu memerlukan system pendidikan yang maju sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Lilis Nurlina, dalam hasil penelitian yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat Tani Ternak dalam Masa Reformasi, faktor yang mendorong pemberdayaan para petani adalah faktor fisik, seperti tanah yang subur, suhu yang mendukung. Sedangkan faktor non fisik adalah pengalaman dan kemampuan para petani.¹²³

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian oleh Arif Eko Wahyudi Arfianto dan Ahmad Riyadh U. Balahmar, faktor pendukung pemberdayaan masyarakat adalah: 1) dukungan pemerintah pusat melalui peran pencetus kebijakan, dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengawal pelaksanaan kebijakan, serta peran pemerintahan desa sebagai fasilitator penyelenggaraan program pemberdayaan; 2) dukungan masyarakat, baik tokoh masyarakat maupun warga

121 Satria Mentari Tumbel, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, *Politico Jurnal Ilmu Politik* PDF, h. 4, <https://www.neliti.com/publications/>, diakses, pada Tanggal 20 Januari 2020

122 *Ibid.*, h. 200

123 Lilis Nurlina dkk., Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat Tani Ternak dalam Masa Reformasi, *Jurnal Sosiohumaniora* Vol. 3, No. 3, Nopember 2001: 155 – 165, <https://www.google.com/>, diakses pada 15 Februari 2020

secara umum terhadap program pemberdayaan masyarakat; 3) partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. 124

b. Faktor-Faktor penghambat

Faktor-faktor penghambat fasilitator atau tenaga pemberdayaan masyarakat sebagai *agent of change* adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, sikap tertutup, ketergantungan, system pendidikan dan mental yang buruk.¹²⁵ Sedangkan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat menurut Lilis Nurlina dkk., adalah yang bersifat fisik adalah kepemilikan lahan yang terbatas dan limbah yang kurang dikelola. sementara itu, bersifat sosial/cultur adalah sikap mentalitas yang lebih berorientasi pada masa kini, kurang bertanggung jawab, dan kurang disiplin.¹²⁶

Sementara itu, faktor penghambat pemberdayaan masyarakat menurut Arif Eko Wahyudi Arfianto dan Ahmad Riyadh U. Balahmar adalah Tidak adanya sarana dan prasarana yang mendukung program pemberdayaan masyarakat dan faktor alam (bencana alam dan cuaca).¹²⁷

B. Kesejahteraan Masyarakat

124 Arif Eko Wahyudi dkk., Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa, JKMP (ISSN. 2338-445X), Vol. 2, No. 1, Maret 2014, 1-10, diakses pada 15 Februari 2020

125 Media Internet., *Op., cit.*, 15 Februari 2020

126 Lilis Nurlina dkk., *op., cit.*, 15 Februari 2020

127 Arif Eko Wahyudi Arfianto dan Ahmad Riyadh U. Balahmar., *op., cit.*, 15 Februari 2020

1. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan (*welfare*) berasal dari kata dasar sejahtera, yang bermakna aman sentosa dan makmur; bermakna selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kesejahteraan bermakna hal atau keadaan sejahtera; Kesejahteraan juga bermakna keamanan, keselamatan, ketenteraman, kesenangan hidup, dan kemakmuran.¹²⁸ Kesejahteraan (*welfare*) bermakna suatu kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan”.¹²⁹

Pemerintah Republik Indonesia mendefinisikan Kesejahteraan Masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹³⁰ Kesejahteraan berhubungan dengan kemiskinan. Apabila kesejahteraan berkonotasi ketercukupan atau terpenuhinya kebutuhan hidup seseorang atau sekelompok orang untuk hidup secara wajar. Sedangkan kemiskinan berkonotasi serba kekurangan seseorang atau sekelompok orang untuk hidup secara wajar.¹³¹

Sementara itu, kesejahteraan yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan (kesejahteraan sosial) merupakan system yang mengatur pelayanan

¹²⁸ Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal 1284

¹²⁹ Ahmad Zaki Badawi, *Mu'jam Mushthalahâtu al-'Ulûm al-Ijtimâ'iyah*, (Beirut, Maktabah Lubnan: New Impression 1982), hal. 445

¹³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial

¹³¹ Budi Setiyono, *Model dan Desain Negara Kesejahteraan*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2018), h. 50

sosial dan lembaga-lembaga yang membantu masyarakat baik individu maupun kelompok masyarakat dalam mencapai tingkat penghidupan yang layak, kesehatan yang layak, sehingga hubungan kemasyarakatan yang seimbang antar individu sesuai dengan kemampuan mereka, memperbaiki kehidupan mereka sesuai dengan kebutuhan masyarakat".¹³²

Dari ragam definisi di atas, kesejahteraan masyarakat menuntut terpenuhinya kebutuhan hidup yang meliputi kebutuhan primer (*primary needs*), sekunder (*secondary needs*) dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer meliputi: pangan (makanan) sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), kesehatan dan keamanan yang layak. Kebutuhan sekunder seperti: pengadaan sarana transportasi (sepeda, sepeda motor, mobil, dsb.), informasi dan telekomunikasi (radio, televisi, telepon, HP, internet, dan lain sebagainya). Kebutuhan tersier seperti sarana rekreasi, hiburan. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat merupakan diametric yang hadapan langsung dengan kemiskinan. Mereka yang sejahtera dan atau yang miskin selalu terpenuhi dan atau kekurangan dalam beberapa kebutuhan, seperti sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal), kesehatan, dan pendidikan.¹³³

Dalam pandangan Isbandi Rukminto Adi, pembangunan kesejahteraan sosial secara komprehensif tidak terpisahkan dari pembangunan spiritual sebagai pendekatan.¹³⁴ Oleh karena itu, kesejahteraan spiritual juga dibutuhkan oleh

¹³² *Ibid.*, h. 399

¹³³ Budi Setiyono, *op. cit.*, h. 50

¹³⁴ Isbandi Rukminto Adi, *op. cit.*, h. 62

masyarakat sebagai modal mencapai kesejahteraan hidup, serta dibutuhkan oleh para pelaku pemberdayaan masyarakat Islam. Menurut Sanzenbach yang dikutip oleh Ife, banyak pelaku pemberdayaan dalam perspektif pekerja sosial, baik individu maupun lembaga berbasis agama selalu memainkan peranan penting dalam sejarah perkembangan pekerja sosial.¹³⁵

Bagi Indonesia, kesejahteraan masyarakat merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai upaya mengisi kemerdekaan bangsa. Tujuan kemerdekaan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, pembangunan nasional merupakan upaya menciptakan kesejahteraan dalam pengertian keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹³⁶ Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial: “kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materiil, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan masyarakat yang didambakan al-Quran menurut Qurashih Shihab, tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa, sehingga bayang-bayang surga itu bisa diwujudkan di bumi dan kelak dihuni secara hakiki di akhirat. Masyarakat yang mewujudkan

¹³⁵ Jim Ife, *Community Development, Creating Community Alternativesvision, Analysis and Practice*, (Melbourne: Addison Wesley Logman Australia Pty Limited, 1995), h.10

¹³⁶ Sudjana, *Pendidikan Non Formal: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Filsafat, dan Teori, Serta Azaz*, (Bandung: Falah Production, 2004), h. 148

bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan.¹³⁷
Kesejahteraan surgawi ini dilukiskan Allah SWT dalam Surat Thaha (20) ayat 117-
119, yang berbunyi :

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ۚ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۚ ۱۱۸ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ۚ ۱۱۹

Artinya: “Hai Adam, sesungguhnya Iblis adalah musuh bagimu dan istrimu, maka janganlah sekali-sekali ia mengeluarkan kalian berdua dari surga, yang akibatnya engkau akan bersusah payah. Sesungguhnya engkau tidak akan kelaparan di sini (surga), tidak pula akan telanjang, dan sesungguhnya engkau tidak akan merasakan dahaga maupun kepanasan” (QS. Thaha (20) : 117-119).

Berdasarkan ayat di atas, surga adalah tidak lapar, dahaga, dan telanjang adalah suatu keadaan yang serba berkecukupan dalam bidang sandang, pangan, dan papan. Dan, surat al-A'raf ayat 10, sebagai berikut:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۙ ۱۰

Artinya: “ Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur” (QS. Al-A'raf (7):10).

Kesejahteraan masyarakat dalam Islam pada intinya mencakup dua hal pokok yaitu kesejahteraan masyarakat yang bersifat jasmani (lahir) dan rohani (batin). Sejahtera lahir dan batin tersebut harus terwujud dalam setiap pribadi

¹³⁷ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhluhi Atas Berbagai Persoalan Umat*. Edisi E-book, h. 126-127

(individu) yang bekerja untuk kesejahteraan hidupnya sendiri, sehingga akan terbentuk masyarakat dan negeri yang sejahtera.¹³⁸ Indikator kesejahteraan masyarakat versi Badan Pusat Statistik tahun 2019 terdiri dari delapan cakupan, yakni bidang kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta kemiskinan.¹³⁹

Konsepsi kesejahteraan masyarakat difahami dalam makna yang berbeda tetapi memiliki substansi yang berbeda, seperti:

- a. Kesejahteraan sebagai kondisi kehidupan/keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial
- b. Kesejahteraan sebagai institusi, yakni arena/bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan masyarakat dan berbagai profesi kemanusiaan sebagai pelaksana program kesejahteraan dan pelayanan masyarakat.
- c. Kesejahteraan sebagai aktivitas, yakni kegiatan atau usaha yang terorganisir dalam mencapai kondisi yang sejahtera.¹⁴⁰

Indonesia mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat melalui kemampuan keluarga, sehingga kesejahteraan masyarakat diberi istilah keluarga sejahtera.

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 pasal 1 disebutkan, bahwa keluarga

¹³⁸ Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada Perseorangan, Keluarga, Kelompok, dan atau Masyarakat. Sedangkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi: Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial. UU No. 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial

¹³⁹ Badan Pusat Statistik, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2019, <https://www.bps.go.id/publication/2019/11/28/27d78d49bc6aa22bd3672b59/indikator-kesejahteraan-rakyat-2019>, diakses pada 15 Februari 2020

¹⁴⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat*, op., cit., h. 2

sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

BKKBN membagi tingkat kesejahteraan keluarga menjadi lima, yakni keluarga sejahtera, keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II keluarga sejahtera III, dan keluarga sejahtera III plus. Keluarga pra sejahtera adalah kelaurga-keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar (kebutuhan agama, pangan, sandang, dan kesehatan). Keluarga sejahtera I adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. Keluarga sejahtera II adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar dan memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya tetapi belum mampu menabung dan informasi. Keluarga sejahtera III adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar dan memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya tetapi belum mampu menabung dan informasi serta belum mampu memberikan sumbangan maksimal kepada masyarakat. Sedangkan keluarga sejahtera III plus adalah keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan pra sejahtera, keluarga sejahtera I, II, dan III secara berkelanjutan terhadap masyarakat.¹⁴¹

Sedangkan indikator yang digunakan oleh BPS dalam penelitian Sueharto tahun 2007 ada delapan indikator, yaitu:

¹⁴¹Faturochman dan Agus Dwiyanto, Validitas dan Reabilitas Pengukuran Keluarga Sejahtera, <https://jurnal.ugm.ac.id/>, diakses, pada 15 Februari 2020

- a. Pendapatan digolongkan menjadi tiga, yakni: 1) Tinggi (> Rp. 10.000.000); 2). Sedang (Rp. 5.000.000); 3) Rendah (< Rp. 5.000.000).
- b. Pengeluaran digolongkan menjadi tiga yakni: 1) Tinggi (> Rp. 5.000.000); 2) Sedang (Rp. 1.000.000 –Rp. 5.000.000); 3) Rendah (< Rp. 1.000.000).
- c. Tempat tinggal digolongkan menjadi empat, yakni: 1) jenis atap rumah; 2) dinding; 3) status kepemilikan rumah; 4) lantai dan luas lantai.
- d. Kesehatan digolongkan menjadi tiga, yakni: 1) Bagus (< 25% sering sakit); 2) Cukup (25% -50% sering sakit); 3) Kurang (>50% sering sakit).
- e. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan digolongkan menjadi lima, yakni: 1) Jarak rumah sakit terdekat; 2) Jarak tempat obat; 3) Penanganan obat-obatan; 4) Harga obat-obatan, dan; 5) Alat kontrasepsi.
- f. Kemudahan mendapatkan pendidikan digolongkan menjadi tiga, yakni: 1) Biaya sekolah; 2) Jarak ke sekolah, dan; 3) Proses penerimaan.
- g. Kemudahan mendapatkan transportasi digolongkan menjadi tiga, yakni: 1) Ongkos kendaraan; 2) Fasilitas kendaraan, dan; status kepemilikan kendaraan.142

2. Program Kesejahteraan Masyarakat

Konsep dan peraturan perundang-undangan akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat apabila diwujudkan dalam bentuk program kegiatan dimasyarakat. Karena, tujuan kesejahteraan masyarakat adalah untuk mengurangi tekanan-tekanan akibat terjadinya perubahan sosio-ekonomi, mengurangi terjadinya konsekwensi sosial yang bersifat negative akibat pembangunan, serta menciptakan kondisi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁴³ Beberapa program kegiatan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

Pertama, kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menetapkan efisiensi alokasi ekonomi makro akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan.¹⁴⁴ Kesejahteraan ekonomi bermakna tercukupinya kebutuhan dasar manusia, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan keamanan serta system negara yang menjamin tersedianya kebutuhan dasar secara adil dibidang ekonomi.¹⁴⁵ Program-program kesejahteraan ekonomi adalah meningkatkan dan mengembangkan aspek produksi, mengembangkan manajemen operasional, dan menjamin ketersediaan modal.

Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya jaminan kesejahteraan masyarakat miskin termuat dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 25 poin a sampai n,

¹⁴³ Isbandi Rukminto Adi, *op., cit.*, h. 5-10

¹⁴⁴ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Gemapress, 1999), h. 23.

¹⁴⁵ Warkum Sumito, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 17.

diantaranya; Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial, menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial, menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial.¹⁴⁶

Selain program di atas, pemerintah menyediakan program bantuan langsung tunai (BLT), menyediakan program raskin, membangun kelembagaan ekonomi desa (KUD dan BUM-Des, menyediakan akses permodalan, Menetapkan tarif minimum dan maksimum harga barang untuk mencegah terjadinya persaingan harga yang tidak sehat.¹⁴⁷

Kedua, kesejahteraan dalam bidang pendidikan. Alenia empat Pembukaan UUD 1945, menyebutkan “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Komitmen pemerintah dalam melaksanakan UUD 1945 tersebut diperkuat dalam pasal 31 [UUD 1945](#) yang menyatakan, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”. Menurut Amartya Sen, akses terhadap pendidikan merupakan salah satu *sosial opportunities*, tidak hanya untuk mencapai taraf hidup yang menyenangkan, tetapi pendidikan penting bagi masyarakat sebagai modal awal untuk berperanserta secara lebih efektif dalam aktivitas ekonomi-politik-kultural secara lebih luas.¹⁴⁸ Untuk itu, kebijakan pemerintah memberikan kesempatan

146 <https://gurupkn.com/>, diakses, pada 14 Februari 2020, diakses, pada Tanggal 15 Februari 2020

147 *Ibid.*,

148 Amartya Sen, Pendidikan untuk Kesejahteraan, <https://www.republika.co.id/>, diakses, pada 16 Februari 2020

pendidikan bagi semua warga negara adalah langkah yang lebih efektif dibandingkan proteksi ekonomi.¹⁴⁹

Tanggung jawab pemerintah tentang kesejahteraan pendidikan, tertuang dalam Perpres No. 9 Tahun 2015, tentang Kemenko PMK bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pembangunan manusia dan kebudayaan. Realisasi perpres tersebut diadakannya Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), berupa bantuan uang kepada peserta didik jenjang SD sebesar Rp 450 ribu /tahun untuk anak SD, SMP Rp 750 ribu /tahun untuk anak SMP, SMA/SMK Rp 1 juta/tahun untuk anak SMA/SMK sederajat baik formal maupun formal bagi keluarga miskin.¹⁵⁰

Ketiga, kesejahteraan kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan SDM. Untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, maka kesehatan rakyat perlu ditingkatkan. Pemerintah memiliki andil besar dalam menjamin kesehatan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam UU No 23 tahun 1992 tentang kesehatan, yaitu : Bab IV pasal 6, pemerintah bertugas mengatur, membina, mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan, bab IV pasal 7 pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, bab IV pasal 8 pemerintah bertugas menggerakkan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan dan pembiayaan kesehatan dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat

¹⁴⁹ *Ibid.*,

¹⁵⁰ Program Bantuan Sosial Untuk Rakyat, <https://kominfo.go.id/>, diakses, pada Tanggal 15 Februari 2020

yang kurang mampu terjamin tetap terjamin, bab IV pasal 9 pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.¹⁵¹

Bentuk program pemerintah dalam bidang kesehatan adalah mengadakan imunisasi gratis bagi balita dan lansia, mengadakan program BPJS untuk masyarakat menengah ke atas dan gratis bagi masyarakat miskin, menyediakan program mobil puskesmas keliling.¹⁵²

Keempat, kesejahteraan spiritual. Salah satu parameter kesejahteraan masyarakat adalah kebebasan beragama. menurut Gomes dan Fisher yang dikutip oleh Barkway, kesejahteraan spiritual adalah suatu keadaan yang merefleksikan perasaan yang positif, perilaku dengan orang lain melalui empat domain, dan hubungan transcendental dengan Yang Maha Kuasa dan alam, serta bertujuan memberikan identitas, keutuhan, kepuasan, suka cita, keindahan, cinta, rasa hormat, sikap positif, kedamaian dan keharmonian batin, serta memberikan arah dalam hidup.¹⁵³ Empat domain tersebut menurut Fisher adalah: a) hubungannya dengan diri sendiri; b) sikap pemaaf, keadilan, cinta, harapan, dan kepercayaan dalam hubungan antar personal; c) kepedulian dan hubungan dengan alam lingkungan; d) aspek transcendental yang berhubungan dengan rasa kekhawatiran, keyakinan, penyembahan dan ibadah.¹⁵⁴

¹⁵¹ Peran Strategis Pendidikan Dalam Pembangunan Kesehatan Dan Kesejahteraan Masyarakat, <https://ilmucerdaspendidikan.wordpress.com/>, diakses, pada Tanggal 15 Februari 2010

¹⁵² <https://gurupkn.com/>, diakses, pada Tanggal 15 Februari 2020

¹⁵³ Patricia Barkway, *Psychology for Health Professionals*, (Australia: Libby Houstone, 2009), h.

¹⁵⁴ John Fisher, *Spiritual Health: Its Nature and Place in the School Curriculum*, (Australia: Melbourne University Custom Book Centre, 201), h. 25-28

Sejahtera (*as-sa'adah*) berarti bahagia. Bahagia adalah jiwa yang merasakan ketenangan, gembira, dimana segala yang diinginkan tercapai sesuai dengan keinginan.¹⁵⁵ Allah SWT berfirman:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
٢٠١

Artinya: “ dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka. (QS. Al-Bagarah (2) : 201

Bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menjamin kesejahteraan spiritual, menjadikan hari besar agama sebagai libur nasional, melakukan pengawasan dan penjagaan tempat ibadah, serta kebebasan beraktifitas keagamaan.

C. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan yang berbasis masyarakat (*people centered depelopment*), yang selalu terfokus pada upaya perubahan, baik secara fisik dan mental maupun ekonomi, pendidikan, politik sosial-budaya masyarakat sebagai penerima manfaat. Dengan demikian, perubahan masyarakat yang ada pada wilayah pedesaan yang penduduknya mayoritas menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, maka tujuan pembangunan lebih difokuskan pada perubahan/perbaikan dalam bidang pertanian.

Dalam pembangunan pertanian, pemberdayaan masyarakat diarahkan pada terwujudnya perbaikan teknis (*better forming*), perbaikan usaha tani, (*better buseness*),

155 Rif'at Sauqi Nawawi, Kepribadian Qur'ani, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 170

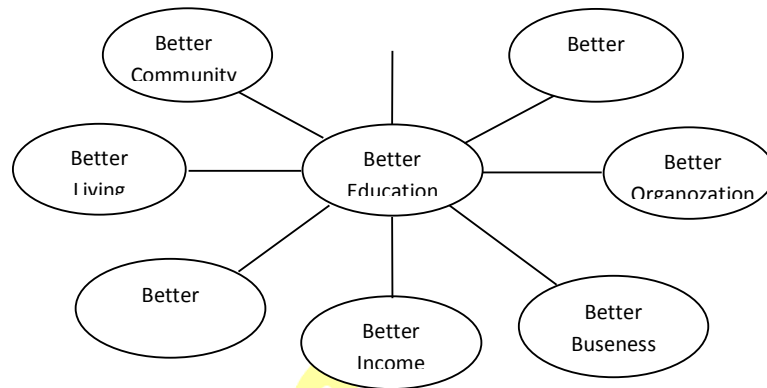
dan perbaikan kehidupan petani serta masyarakatnya.¹⁵⁶ Menurut Deptan yang dikutip oleh Totok Mardikanto,¹⁵⁷ untuk mewujudkan tiga bentuk perbaikan tersebut, diperlukan perbaikan-perbaikan lain, seperti:

1. Perbaikan kelembagaan (*better organization*) demi terjalannya kerjasama dan kemitraan antar *stake holders*. Kerjasama dan kemitraan yang dilakukan secara berkelompok akan meningkatkan produktivitas melalui inovasi teknis;
2. Perbaikan kehidupan masyarakat (*better community*), yang diwujudkan dalam perbaikan pendapatan, stabilitas keamanan, dan politik, sehingga terciptanya suasana kondusif bagi terlaksananya sub sector pembangunan sebagai bagian dari sub system pembangunan masyarakat (*community development*). Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian, tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak memiliki financial yang didukung oleh stabilitas politik dan keamanan serta pembangunan bidang dan sector yang lain. Sebaliknya, pemberdayaan tidak akan berarti apabila tidak memberikan perbaikan pada kehidupan masyarakat (*sejahtera*).
3. Perbaikan usaha dan lingkungan hidup (*better environment*). Penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan akan berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat (petani) dan berbahaya bagi kelangsungan lingkungan hidup serta mengancam *sustainability* pembangunan.

Berdasarkan konsep tujuan pembangunan pertanian di atas, menurut Totok Mardikanto, tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan dalam bidang

156 Toto
157 *Ibid.*,

pendidikan, aksesibilitas, tindakan, kelembagaan, usaha, pendapatan, lingkungan, kehidupan, masyarakat.158 Sebagaimana pada gambar berikut:



Gambar 1: Program dan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat, dalam Totok Mardikanto, Pemberdayaan Masyarakat, h. 111

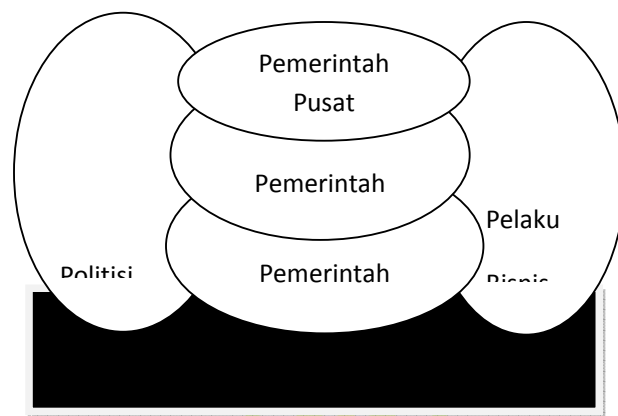
1. Perbaikan pendidikan (*better education*), bahwa pemberdayaan masyarakat harus diupayakan sebagai bentuk pendidikan masyarakat yang menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam hal materi, metode, tempat dan waktu, fasilitator dan penerima manfaat, serta berkelanjutan.
2. Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*). Perubahan semangat belajar sepanjang hayat, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya terhadap informasi, sumber pembiayaan, penyedia produk, teknologi, dan lembaga pemasaran.
3. Perbaikan tindakan (*better action*). Perbaikan dalam bidang motivasi belajar dan aksesibilitas akan terjadi tindakan-tindakan yang lebih baik dan inovatif;

4. Perbaikan kelembagaan (*better institution*) merupakan implikasi dari perbaikan tindakan atau perilaku;
5. Perbaikan usaha (*better business*) merupakan implikasi dari perbaikan pembelajaran, aksesibilitas, tindakan, dan kelembagaan;
6. Perbaikan pendapatan (*better income*) merupakan pengaruh dari perbaikan bisnis/usaha, terutama perbaikan pendapatan keluarga dan masyarakatnya;
7. Perbaikan lingkungan (*better environment*) merupakan pengaruh dari perbaikan pendapatan, karena kerusakan lingkungan banyak disebabkan oleh kemiskinan;
8. Perbaikan kehidupan (*better living*). Perbaikan pendapatan dan lingkungan diharapkan dapat memperbaiki kehidupan keluarga dan masyarakat;
9. Perbaikan masyarakat (*better community*). Kehidupan yang lebih baik didukung oleh lingkungan fisik dan sosial yang baik, akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik (sejahtera).

Program/kegiatan pemberdayaan akan lebih mudah dicapai apabila mempertimbangkan berbagai hal, diantaranya pertimbangan kebijakan-kebijakan yang tepat sesuai dengan tahapan proses pemberdayaan. Menurut Totok Mardikanto, salah satu yang harus dipertimbangkan sebelum melaksanakan pemberdayaan masyarakat, perlu adanya ketegasan tentang kebijakan dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan pemberdayaan, baik untuk tingkat nasional dan regional maupun tingkat lokal. Komitmen berbagai pihak, khususnya pemerintah sebagai pembuat kebijakan sangat diperlukan, karena pemberdayaan yang sinergi dengan kebijakan pemerintah

merupakan salah satu bentuk daya dukung yang mempermudah pencapaian tujuan.¹⁵⁹

Sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2 : Kedudukan Masyarakat, Pemerintah, Politis, dan Pelaku Bisnis, dalam Totok Mardikanto, Pemberdayaan Masyarakat, h. 121

Perlu diingat, bahwa masyarakat lapisan bawah selalu menjadi sub-ordinat aparat birokrasi yang didukung dan atau memperoleh tekanan para politikus dan pelaku bisnis. Oleh karena itu, ide-ide pemberdayaan masyarakat dalam upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat harus mengakomodasikan kepentingan sekaligus peranan politikus, birokrasi (pemerintah), dan pelaku bisnis.

Beberapa pendapat dan sudut pandang tentang rumusan-rumusan peranan. Peranan adalah berasal dari kata peran, yaitu laku, hal berlaku,/bertindak, pemeran, pelaku, pemain, sedangkan peranan (*role*) adalah fungsi, kedudukan, bagian kedudukan.¹⁶⁰ Dalam konteks kelembagaan, peranan adalah aspek dinamis suatu lembaga atau mewakili tata institusional suatu lembaga pemerintah.

¹⁵⁹ *Ibid.*, h. 179

¹⁶⁰ Dahlan Al Barry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Arkola, 1994), h. 501

Pariata Westra dalam Tuti mengatakan bahwa peranan dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang sesuatu hal tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁶¹ Pengertian yang lain dikemukakan oleh Mayor Palak dalam Tuti, bahwa: “Peranan atau role adalah suatu kelakuan yang diharapkan dari oknum dalam antar hubungan sosial tertentu yang berhubungan dengan status sosial tertentu”.¹⁶²

Pemerintah sebagai personifikasi negara berupaya mewujudkan tugas dan tujuan negara menjadi kenyataan dan sebagai personifikasi atau alat pemerintah adalah birokrasi pemerintah sebagai pelaksana jabatan karier. Baik Birokrasi pemerintah di tingkat pusat disebut kementerian Negara beserta jajarannya yang membantu fungsi presiden sebagai eksekutif atau kepala pemerintahan. Pemerintah itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang (a) memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, bagian dan (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan.¹⁶³ Jadi, peranan pemerintah adalah pelaksanaan fungsi pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati/walikota, dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sebagaimana amanat UU No. 32 Tahun 2004, Pasal I, ayat 3.

Menurut Pariata Westra dkk., dalam Tuti, Peran pemerintah daerah dalam pembinaan masyarakat terbagi menjadi empat peran yaitu¹⁶⁴:

¹⁶¹ Pariata Westra dkk., Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Goa, Jurnal OTORITAS Vol. IV No. 1 April 2014, h. 68-69, <https://www.researchgate.net/publication/>, diakses pada 4 Agustus 2019

¹⁶² *Ibid.*,

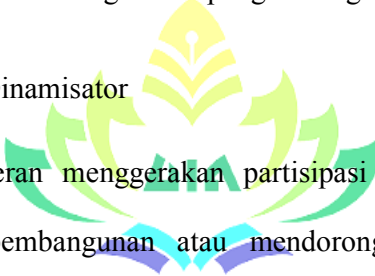
¹⁶³ Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 8

¹⁶⁴ Tuti A. Verawati, *op. cit.*

1. Pemerintah sebagai Regulator

Pemerintah sebagai Regulator berupaya menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan dengan cara menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur pelaksanaan pemberdayaan dimasyarakat. Misalnya, Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi akan dikaitkan dengan kebijakan yang mendukung dalam pengembangan usahanya.

2. Pemerintah sebagai Dinamisator



Pemerintah berperan menggerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan atau mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Sebagai dinamisator, pemerintah berperan memberikan bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Pemerintah melalui tim penyuluh atau pendamping desa maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.

3. Pemerintah sebagai Fasilitator

Pemerintah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan, menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan/ permodalan.

4. Pemerintah sebagai Katalisator

Pemerintah mempunyai kedudukan sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi *sosial capital* untuk membangun partisipasi.

Menurut Thoha dalam Sembiring, peran birokrasi menjadi mengemuka karena di dalam masyarakat sudah berkembang penguasa-penguasa politik yang telah mendelegasikan urusan-urusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pada birokrasi bahkan mencantumkannya pada infrastruktur birokrasi. Oleh karena posisinya yang strategis dan mempunyai keahlian profesional dalam fungsinya, serta mekanisme perencanaan dan pelaksanaan kebijakan erat sekali, maka peranan birokrasi dalam “*public policy*” sangat penting.¹⁶⁵

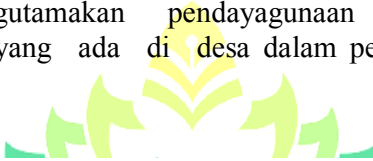
Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Islam, paling tidak kebijakan dalam bidang pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan kebijakan sumber pembiayaan (keuangan).

Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Bab 2 Pasal 3 tentang Pasal 3, tentang Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Keadilan: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan;
- b. Kebutuhan prioritas: mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Terfokus: mengutamakan pilihan penggunaan dana desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan dana desa yang dibagi rata.

¹⁶⁵Masana Sembiring, *Budaya Dan Kinerja Organisasi*, (Bandung: Fokusmedia, 2012), h. 1

- d. Kewenangan desa: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- e. Partisipatif: mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat desa;
- f. Swakelola: mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dana desa;
- g. Berdikari : mengutamakan pemanfaatan dana desa dengan mendayagunakan sumberdaya desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat desa sehingga dana desa berputar secara berkelanjutan di wilayah desa dan/atau kabupaten/kota;
- h. Berbasis sumberdaya desa: mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dana desa;
- i. Tipologi desa: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa. berbunyi Berbasis sumber daya desa: mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dana desa.



Kebijakan pemerintah dalam bidang sumber daya manusia tertuang pada peraturan Permendagri no. 114 tahun 2014 tentang pembangunan desa. Pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 3 berbunyi: “Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁶⁶ Pemberdayaan masyarakat desa dalam bidang sumber daya manusia tertuang pada bagian kedua Pasal 6 Poin 5 tentang pemberdayaan masyarakat meliputi, kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa dan perangkat desa, seta peningkatan kapasitas masyarakat berdasarkan kelompok profesi. Pasal 63, Pelaksanaan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan SDM dan SDA desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Permendagri No. 114 tahun 2014

¹⁶⁷ *Ibid.*,

Kebijakan dalam bidang sumber daya alam (SDA). Pengelolaan sumberdaya alam merupakan pengelolaan lahan, air, tanah, tumbuhan, dan hewan, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam yang mempengaruhi kualitas hidup manusia, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.¹⁶⁸ Pengelolaan sumber daya alam berkaitan dengan interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Hal itu mencakup rencana penggunaan lahan, pengelolaan air, konservasi keanekaragaman hayati, dan industri keberlanjutan, seperti pertanian, pertambangan, pariwisata, perikanan, dan kehutanan.¹⁶⁹

Pengelolaan Sumberdaya Alam pada Sektor Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dan strategis, bukan hanya pada sektor ekonomi tapi juga pada sosial dan politik.¹⁷⁰ Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengembangkan sektor pertanian antara lain melalui peningkatan teknologi, penambahan input, maupun melalui kebijakan-kebijakan pemerintah.¹⁷¹ Sumberdaya atau input yang digunakan dalam produk pertanian biasanya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Sumberdaya internal (*internal resources*), sumberdaya yang berasal dari alam, seperti tanah, air, dan bibit.
- b. Sumberdaya eksternal (*external resources*), sumberdaya yang berasal dari luar atau selain sumberdaya alam, seperti traktor, pupuk, pestisida, dan bahan kimia lainnya.

¹⁶⁸ Anonim, *Natural Resource Management*. (On-line)<http://www.wikipedia.org./natural-resource-management>, diakses tanggal 9 Agustus 2019

¹⁶⁹ *Ibid.*,

¹⁷⁰ Sutikno dan Maryunani, *Ekonomi Sumberdaya Alam*, (Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2006)

¹⁷¹ *Ibid.*,

Pengelolaan Sumberdaya Alam pada Sektor Perikanan adalah mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal, adil, dan lestari melalui keterpaduan antar berbagai pemanfaatan, sehingga memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional, pembangunan daerah, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Beberapa kegiatan pokok pada sector perikanan antara lain sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan peraturan dalam pengelolaan sumberdaya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara terintegrasi.
- b. Pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara efisien, dan lestari berbasis masyarakat.
- c. Pengembangan sistem MCS (*monitoring, controlling, and surveillance*) dalam pengendalian dan pengawasan, termasuk pemberdayaan masyarakat dalam sistem pengawasan.
- d. Penataan ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sesuai dengan daya dukung lingkungannya.¹⁷²

Penafsiran tentang pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dimaknai sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi-generasi mendatang. Oleh karena itu, dalam pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara hati-hati dan penuh rasa tanggung jawab agar tidak memberikan dampak negative pada orang lain, baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang.¹⁷³ Menurut Suparmoko dalam Sutikno, kebijakan sumber daya alam yang bertanggungjawab terhadap generasi saat ini maupun generasi yang akan datang adalah satu himpunan peraturan serta tindakan yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya alam yang bertujuan untuk menjadikan perekonomian bekerja secara

¹⁷² Anonim, *Natural Resource Management*, *ibid.*,
¹⁷³ Sutikno, *op.*, *cit.*,